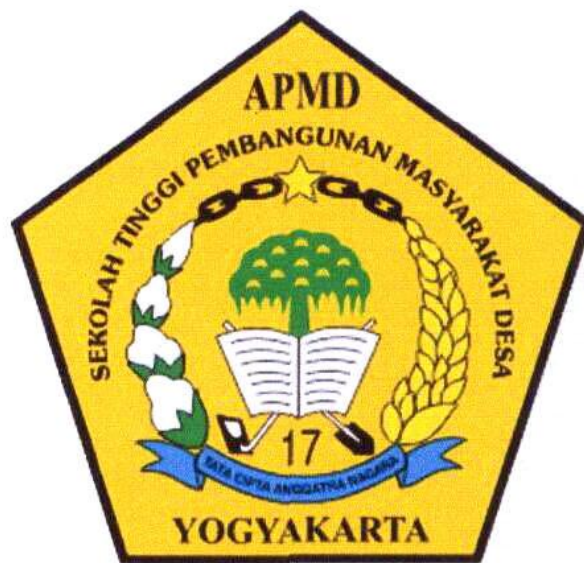


**SKRIPSI**  
**DEVELOPMENTAL GOVERNMENT**  
**(Studi Tentang *Sustainable Development Goals* Desa Membentuk**  
**Pemerintahan Developmental di Ranah Desa di Kalurahan Sambirejo,**  
**Prambanan, Kabupaten Sleman, DIY)**



**Di Susun Oleh :**

**ERWIN RANGGA BRANI**  
**18520014**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN**  
**SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN DESA “APMD” YOGYAKARTA**

**2022**



## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Tim Penguji untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar sarjana (S1) Program Studi Ilmu Pemerintahan, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 26 Juli 2022


Waktu : 13.00 WIB

Tempat : Ruang Ujian Skripsi STPMD “APMD” Yogyakarta

NAMA	TIM PENGUJI	TANDA TANGAN
1. <u>Dr. Sutoro Eko Yunanto</u> Ketua Penguji/ Pembimbing		
2. <u>Dr. Adji Siradji Muhammad, S.Sos., M.Si</u> Penguji Samping I		
3. <u>Drs. Sumarjono, M.Si</u> Penguji Samping II		



Mengetahui,  
Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan

  
Dr. Guno Tri Tjahjoko, M.A

## HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Erwin Rangga Brani

NIM : 18520014

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **DEVELOPMENTAL GOVERNMENT (Studi Tentang *Sustainable Development Goals* Desa Membentuk Pemerintahan Developmental di Ranah Desa di Kalurahan Sambirejo, Prambanan, Kabupaten Sleman, DIY)** adalah benar-benar merupakan hasil kerja dan karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan benar sesuai aslinya. Apabila di kemudian hari ternyata pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku.

Yogyakarta, 28 Juli 2022

Penulis



Erwin Rangga Brani

## **MOTTO**

We were all born to win, but to win, we must plan to win, prepare to win, and expect to win.

*(Zig Ziglar)*

Life is too short to waste any amount of time on wondering what other people think about you. In the first place, if they had better things going on in their lives, they wouldn't have the time to sit around and talk about you. What's important to me is not others' opinions of me, but what's important to me is my opinion of myself.

*(C. Joybell C)*

Believe in yourself and you will be unstoppable

\*\*

Jika kamu tidak berani melakukan sesuatu yang kecil, bagaimana mungkin kamu bisa melakukan sesuatu yang lebih besar

*(Rudiyanto Zainudin)*

Hadir dan dipilih, bukan untuk dilayani tetapi untuk melayani. Melayani dengan mendidik, mendidik dan melayani.

*(Verlin Takdir Setiawan Waruwu)*

**IM ON THE NEXT LEVEL**

*(Aespa)*

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan penuh ucapan syukur dan rasa limpah terimakasih penulis, karya yang sederhana ini saya persembahkan kepada:

1. Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan banyak limpahan rahmat serta melindungi dan memberikan napas kehidupan.
2. Kepada diri sendiri yang telah berjuang dan bisa bertahan sampai saat ini. Ini bukan akhir dari perjuangan kehidupan akan tetapi ini adalah awal untuk memulai kehidupan untuk menjadi diri yang terus berguna bagi orang banyak. Tetap semangat, mari menjadi pribadi yang lebih kuat lagi, yang lebih sulit sudah menanti untuk dilalui. *let's make the universe smile.*
3. Kedua orang tua kandung yang tercinta saya Jamaludin dan Erni yang merupakan sosok penting bagi kehidupan saya. Berkat dukungan mereka dalam berbagai aspek baik itu moril dan materil, saya bisa tumbuh seperti sekarang. Teruntuk kedua orang tua saya, untuk sekarang saya hanya bisa mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas segala hal yang telah diberikan. Semoga ini adalah langkah awal untuk saya membanggakan ayah dan ibu. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih banyak kepada orang tua sambung saya Burhanudin Ali dan Nursia. Terima kasih telah merawat dan menjaga kedua orang tua kandung saya. Menjadi seperti sekarang tidak lepas dari doa dan dukungan kalian. Rasa syukur dan terima kasih tak terhingga ini saya ucapkan kepada keempat orang tua saya.
4. Kepada Kakek dan Nenek saya, Bia Baso, Siti Hanafiah, Aminah, Haji Hasan, Abdul Aziz, dan (Alm) Salela. Terima kasih atas segala kasih sayang, nasehat, dan didikannya yang telah diberikan kepada saya. Terkhusus untuk Nenek saya Bia Baso, ucapan terima kasih ini sebenarnya tidak cukup untuk membalas jasa mu, untuk saat ini saya hanya bisa mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Terima kasih telah merawat dan membesarkan saya hingga saya menjadi seperti ini. Terima kasih banyak atas kasih sayangnya selama ini yang tidak saya dapatkan dari orang lain. Terima kasih telah menjadi ibu sekaligus ayah bagi saya.

5. Teruntuk keluarga saya, Tante, Paman, Bibi saya. Terima kasih banyak atas segala hal doa dan dukungannya.
6. Teruntuk teman terbaik, sahabat sekaligus saudara saya, Muhammad Sohid Harahap dan Aldi. Terima kasih telah menjadi bagian dari cerita hidup saya. Terima kasih atas waktu yang pernah kita lalui bersama.
7. Bapak Dr Sutoro Eko Yunanto selaku dosen pembimbing saya yang telah menginspirasi saya untuk lebih giat dalam belajar, menciptakan kebiasaan yang baik untuk meningkatkan khazanah pengetahuan, mengajarkan berjuang keluar dari tekanan, lebih percaya diri dan yang paling penting adalah pengetahuan yang bisa bermanfaat untuk orang lain bukan untuk diri sendiri. Banyak hal yang saya dapatkan selama bimbingan bersama beliau, bukan hanya bimbingan dalam konteks skripsi akan tetapi juga membentuk mental baru.
8. Bapak dan Ibu Dosen STPMD “APMD” Yogyakarta. Terima kasih atas ilmu yang telah diberikan kepada saya selama menempuh pendidikan.
9. Keluarga Besar Ikatan Mahasiswa Muslim Komodo Yogyakarta (IKMMIKOM-Y).
10. Keluarga Besar Mahasiswa Samili-Kalampa (PASAKA)
11. Teman-teman Pengurus Korps Mahasiswa Ilmu Pemerintahan KOMAP “STPMD” APMD Yogyakarta periode 2019-2020
12. Teman-Teman, Junior, dan Senior satu almamater dan satu daerah: Haris Mandala Putra, Ansharudin, Muhammad Iksan, Farid Sulaiman, Muhammad Hendra.
13. Senior-senior dan junior saya dari Lemes di kota Jogja; Junaidin Aswar, Muhammad Yusran, Darwis, Farid Sulaiman, Hardiyansah, Mustika Hidayanti, Lilis Kusmiati.
14. Senior-senior Kampus saya, Kak Mumun (Rajin Menabung dan Tidak Sombong), Kak Verlin, Kak Ari. Suatu kebanggaan bisa mengenal kalian di tanah rantauan ini. Terkhusus Kak Mumun, terima kasih banyak telah membimbing dan membantu saya selama kuliah di STPMD “APMD”.

15. Senior saya sekaligus Abang dan Kakak saya, Muhammad Ryan Santula, Kak Fira dan Kak Ipa.
16. Teman-teman Kelas IP 1 B 2018 STPMD “APMD” Yogyakarta; Ahmad Fithriani, Muhammad Sohid, Ronggo Punto Aji, Rama Tony Maulana, Ronan Christy, Erwin Soviana Satriani, Alang Yudi Erick, Adrianus Oulana, Putri Ayu, Felinda, Nessi Marceta, Rostiana, Dian Laurensa, Abdul Syukur, Ancis, Andhika, Figo, Mardini Ingan, Valentina Febiola, Enky, Clemens Mario, Hamid Arrozak, Fabianus Djawa, Khairul Imam, Riska, Samuel Paliosa, Vinore, dan yang lainnya. Terima kasih telah menjadi teman sekaligus saudara saya di tanah rantauan.
17. Teman-teman saya mulai dari SD, SMP, dan SMA yang selalu saling tolong menolong, bercanda dan bermain bersama; Popy Sah Putry, Sumiati, Indra Ratna Sari, Sri Wahyuni, Ajrul Azwar, Mul Al Hidayat, Sri Anita, Adriyanti Fauziyah, Muhammad Rizkan Ulumudin, Siti Hawa. Terima kasih telah memberikan energi positif kepada saya selama ini.
18. Teruntuk teman saya; Aldi Setiawan, Dimas Aji, Daniel, Valent, Andri, Wahyu Anugrah, terima kasih sudah menjadi teman main saya selama kuliah di Jogja. Terkhusus untuk Wahyu Anugrah, terima kasih atas segalanya, terima kasih telah membantu saya banyak hal, terima kasih atas dukungannya, terima kasih telah sabar mendengarkan cerita random saya, terima kasih telah menjadi saudara saya di tanah rantauan.
19. Teruntuk Ben (Lee Eun-Young), terima kasih atas karyamu yang luar biasa, lagu-lagumu telah menemani keseharian saya dan selama saya mengerjakan skripsi ini.
20. Aespa I Love You, Terkhusus Karina (Yu Jimin), terima kasih telah membuat saya terkagum-kagum ketika melihat kecantikanmu.

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya atas segala daya dan upaya yang telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul “Developmental Government (Studi Tentang *Sustainable Development Goals* Desa Membentuk Pemerintahan Developmental di Ranah Desa di Kalurahan Sambirejo, Prambanan, Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta)

Terselesaikannya penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dari berbagai pihak yang telah memberikan dukungan doa, bimbingan maupun saran yang berguna dalam penyusunan skripsi ini. Untuk itu, pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, Kepada:

1. Bapak Dr. Sutoro Eko Yunanto selaku Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta, sekaligus Dosen Pembimbing penulis yang telah memberikan banyak pencerahan kepada penulis dengan penuh kesabaran sampai selesainya skripsi ini. Dibimbing kurang lebih satu tahun berlalu merupakan sebuah kehormatan bagi penulis. Banyak hal yang didapatkan penulis selama bimbingan.
2. Bapak dan Ibu Dosen Prodi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta yang telah memberikan banyak pengetahuan kepada penulis selama menempuh pendidikan di STPMD “APMD” Yogyakarta



3. Pemerintah dan Masyarakat Kalurahan Sambirejo yang telah menerima dan membantu penulis selama kegiatan magang dan penelitian.
4. Keluarga Besar Penulis yang telah memberikan banyak dukungan, baik moril maupun materil.
5. Rekan-rekan mahasiswa yang telah memberikan banyak dukungan dan menjadi motivator bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam usaha penyusunan skripsi, tidak luput dari kekurangan, kesulitan, hambatan maupun rintangan, dan tentunya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan dan melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada Bapak, Ibu Dosen beserta semua pihak atas segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.

Yogyakarta, 27 Juli 2022

Erwin Rangga Brani

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN COVER</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>x</b>
<b>INTISARI</b> .....	<b>xii</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	18
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	18
D. Literature Review .....	19
E. Fokus Penelitian .....	22
F. Kerangka Konseptual.....	23
1. Developmentalisme .....	23
2. Governmentality .....	33
G. Metode Penelitian.....	36
1. Teknik Pengumpulan Data .....	38
2. Analisis Data .....	40
3. Metode Penyajian Data .....	43
<b>BAB II PROFIL KALURAHAN SAMBIREJO</b> .....	<b>44</b>
A. Sejarah.....	44
B. Geografis.....	46
C. Demografi.....	47
D. Sarana dan Prasarana.....	52
E. Keadaan Sosial, Ekonomi dan Budaya .....	54
F. Potensi Desa Wisata .....	55

G. Prestasi Kalurahan Sambirejo.....	58
H. Pemerintah Kalurahan Sambirejo.....	59
I. Visi Misi Kalurahan Sambirejo.....	62
<b>BAB III NO ONE LEFT BEHIND.....</b>	<b>64</b>
<b>BAB IV PROYEK.....</b>	<b>83</b>
<b>BAB V MEMBELENGGU DESA.....</b>	<b>101</b>
<b>BAB VI PENUTUP.....</b>	<b>113</b>
A. Kesimpulan.....	113
B. Meneguhkan Kembali Desa sebagai Subjek Pembangunan.....	117
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>120</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>125</b>

## INTISARI

Pembangunan menjadi sebuah ciri khas teknokrasi, yang memukul atau menjawab semua permasalahan dengan pembangunan. Kehadiran program pembangunan *SDGs* Desa yang dibawa oleh para teknokrat ini menjadi substansi utama pembangunan dengan menghadirkan 18 tujuan yang dianggap mulia dengan semboyan *no one left behind*. Kehadiran program ini menjadi kontradiksi yang menjadikan desa sebagai lokus dari pembangunan yang mengubah posisi desa sebagai subjek dari pembangunan menjadi objek pembangunan sebagai penerima, klien, atau bahkan partisipasi pembangunan.

Kenyataan seperti ini tentang program pembangunan memberikan peneliti satu kesimpulan bahwa pembangunan sangat erat kaitannya dengan proses dan kepentingan para teknokrat itu sendiri. Desa sebagai sebuah entitas mempunyai kewenangannya sendiri dalam urusan pembangunan sesuai dengan kepentingan lokal. Kehadiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dengan membawa dua asas utama rekognisi dan subsidiaritas memberikan makna kemandirian bagi desa, desa mempunyai kewenangan sendiri dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya termasuk dalam urusan pembangunan. Pembangunan itu milik desa bukan milik para teknokrat. Kehadiran program ini yang dipaksakan ke dalam tubuh desa membentuk pemerintahan bercorak pembangunan yang menggeserkan hakekat pemerintahan sebagai pemberi pelayanan dan perlindungan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif interpretatif. Pengumpulan data dilakukan melalui kegiatan magang, wawancara, dokumentasi. Penulis menggunakan metode penelitian ini untuk mengkonstruksi atau memberi makna atas fenomena yang diteliti. Kemudian peneliti merangkum informasi yang telah didapatkan, menarasikan, menginterpretasi dan mengkonstruksi informasi dan fakta yang ditemui di lapangan.

Dalam penelitian ini, penulis menjelaskan bagaimana wacana program pembangunan *SDGs* Desa ini hadir sebagai salah satu cara pemerintah untuk mengatur dan memerintah desa. Sehingga pada akhirnya kehadiran program ini membentuk suatu jenis pemerintahan yang bercorak pembangunan (*developmental government*). Untuk menjelaskan hal tersebut, peneliti menggunakan prespektif *governmentality* sebagai pisau analisis.

**Kata Kunci:** *Governmentality, SDGs* Desa, *Developmental government*.

## ABSTRACT

*Development is a characteristic of technocracy, which hits or answers all problems with development. The presence of the Village SDGs development program brought by these technocrats has become the main substance of development by presenting 18 goals that are considered noble with the motto "no one left behind". The existence of this program is a contradiction that makes the village the locus of development which changes the position of the village as a subject of development into an object of development as a recipient, client, or even development participation.*

*This fact about the development program gives researchers a conclusion that development is closely related to the processes and interests of the technocrats themselves. The village as an entity has its own authority in development affairs in accordance with local interests. The presence of Law Number 6 of 2014 concerning Villages by bringing two main principles of recognition and subsidiarity provides the meaning of independence for the village, the village has its own authority in regulating and managing its household including development affairs. The development belongs to the village, not to the technocrats. The presence of this program which is forced into the village body forms a development-style government that shifts the nature of government as a provider of services and protection.*

*This study uses an interpretive qualitative research method. Data collection is done through internships, interviews, and documentation. The author uses this research method to construct or give meaning to the phenomenon under study. Then the researcher summarizes the information that has been obtained, narrates, interprets and constructs the information and facts found in the field.*

*In this study, the author explains how the discourse on the Village SDGs development program is present as a way for the government to regulate and govern villages. So that in the end the presence of this program forms a type of developmental government. To explain this, the researcher uses the perspective of governmentality as an analytical knife.*

**Keywords: Governmentality, Village SDGs, Developmental government.**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam buku Kaya Proyek Miskin Kebijakan, menceritakan pembangunan desa orde baru yang menjadi ikon pada saat itu. Negara menjadi aktor untuk melaksanakan dan mengendalikan desa dengan berbagai program secara sentralistik-teknokratis melalui GBHN dan program Repelita. Pembangunan yang di tawarkan mempunyai sederet tujuan yang mulia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Tetapi hal ini tidak memberikan kesejahteraan bagi masyarakat desa. Kebijakan pembangunan pedesaan yang dikuasai oleh oligarki tidak lebih dari sekedar politik etis, yang menempatkan desa sebagai obyek kebijakan dan tempat membuang bantuan. Banyak proyek yang dibuat tanpa konsultasi dengan rakyat. Banyak data-data yang menunjukkan bukti kegagalan pembangunan desa di Indonesia, pembangunan desa di Indonesia masa orde baru memang mendongkrak mobilitas sosial orang-orang desa, sekaligus mengubah fisik desa menjadi lebih maju, tetapi mobilitas sosial itu bukanlah transformasi sosial yang mampu mendongkrak *human well being* masyarakat desa. Pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan tidak serta-merta memperkuat fundamental ekonomi, Indonesia hanya mampu membangun gelembung ekonomi yang rentan terhadap pembangunan ekonomi global. Sedangkan, ekonomi rakyat yang sangat dekat dengan kehidupan masyarakat desa tidak tumbuh secara kuat. Kegagalan pembangunan desa terletak pada miskinnya

kebijakan, yang seharusnya mengandung komitmen politik, keberpihakan kepada desa, menghargai orang-orang desa dan mendongkrak *human well being* orang desa serta program-program pembangunan yang relevan dengan konteks lokal masyarakat desa. Tetapi, pembangunan yang masuk ke dalam ranah desa justru hadir dalam bentuk serangkaian proyek yang menjadikan masyarakat desa sebagai objek pembangunan yang memarjinal dan memiskinkan masyarakat desa. (Sutoro *et al.*, 2006)

Pada era saat ini, perencanaan pembangunan seolah-olah telah menjadi kegiatan utama yang sedang digalakkan oleh pemerintah. Dengan tujuan lain yaitu untuk mencapai modernisasi. Adanya keinginan untuk membuat negara modern inilah kemudian semakin digalakkan pembangunan oleh pemerintah. Bahkan kegiatan dan konsep pembangunan ini kemudian diterapkan dalam berbagai hal, termasuk pembangunan desa. Maraknya kegiatan pembangunan ini belum sepenuhnya mampu menghadirkan kesejahteraan. Pembangunan di berbagai sektor juga belum dapat menampung dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Dapat kita lihat bahwa hingga kini masalah kemiskinan di desa belum bisa ditanggulangi dengan baik. Bahkan semakin maraknya pembangunan semakin menambah deret kemiskinan. Keberhasilan pembangunan yang dibuat pemerintah terhadap daerah maupun desa hanya menyajikan seberapa banyak proyek-proyek yang menghasilkan laporan-laporan.

Banyaknya program-program pembangunan yang digalakkan pemerintah sebagai upaya untuk mensejahterakan masyarakat desa dan menanggulangi kemiskinan diantaranya Inpres Desa Tertinggal (*IDT*), Program Tabungan

Kesejahteraan Rakyat Kredit Usaha untuk Kesejahteraan Rakyat (*Takesra-Kukesra*), Program Penanggulangan Dampak Kritis Ekonomi (*PDM-DKE*), dan program Jaring Pengaman Sosial Bidang Kesehatan (*JPS-BK*), kemudian diteruskan dengan program dana bergulirnya program subsidi langsung tunai/ Bantuan Langsung Tunai (*SLT/BLT*), bantuan Operasional Sekolah (*BOS*). Dari sederet program-program yang dibuat pemerintah belum sepenuhnya mensejahterakan masyarakat. Banyaknya program bantuan untuk masyarakat ini menjadi kelemahan mendasar negara yang menganggap masyarakat miskin dan hanya membutuhkan bantuan cuma-cuma, sehingga desa dijadikan tempat membuang bantuan bagi pemerintah. (Solikatur, Supono *et al.*, 2014)

Desa adalah lingkaran sosial masyarakat yang memiliki “jarak sosial” tertentu dengan lingkaran pengelola kekuasaan di tingkat pusat. Dikatakan demikian karena hampir setiap proses pengelolaan kebijakan publik menafikan adanya keterlibatan dan keikutsertaan masyarakat yang hidup di pedesaan. Pemerintah pusat atau negara sebagai simbol utama kekuasaan pusat seolah hanya memiliki ikatan formal hukum kuasa atas sesuatu kawasan tanpa memperhatikan dimensi budaya yang telah berakar dan membatin di dalam kehidupan masyarakat lokal. Ironisnya, adanya jarak sosial tidak diobati dengan kebijakan politik yang makin lebih mendekatkan, tetapi melumat habis dengan menciptakan negaranisasi atas desa atau adat. Kemajemukan budaya diseragamkan dan masyarakatnya dipaksakan masuk ke dalam wadah tunggal bentukan negara. Kehadiran negara kedalam kehidupan desa menciptakan berbagai produk pembangunan yang tak lagi membutuhkan partisipasi dan aspirasi masyarakat, tetapi cukup dipandu dari



atas dan dilanjutkan untuk dilaksanakan oleh para elite-elite negara di desa. Desa bukannya dijadikan sebagai subyek politik tetapi desa dan masyarakatnya benar-benar dijadikan sebagai obyek. Berdasarkan hal tersebut, munculnya konstruksi negara atas desa. Pertama, mengkonstruksikan desa sebagai obyek kawasan yang dikendalikan secara politik yang tidak lagi memiliki kebebasan menjalankan pilihan-pilihan sosial atas penghidupannya. Sebagai obyek politik, desa tidak memiliki suara dalam mengungkapkan aspirasi dan kebutuhan yang terbaik menurut dirinya, dan hanya mengikuti apa yang menjadi kehendak negara. Kedua, sebagai obyek pembangunan, desa ditempatkan sebagai arena membuang bantuan. Hampir semua program bantuan pembangunan masuk desa, namun bantuan tersebut tetap saja membuat orang desa miskin dan hidup serba melarat. Ketiga, desa dikonstruksikan sebagai kepanjangan tangan negara (miniatur pemerintah). Dalam konteks ini desa dianggap memiliki *self governing community*. Tetapi desa kini ditempatkan secara *hierarkhis* sebagai bagian dari struktur pemerintahan yang berada di bawahnya. Kepala desa sekalipun dipilih oleh masyarakat, eksistensinya di desa adalah sebagai aparatur negara atau aparatur pemerintah yang peran dan kinerjanya di desa hanyalah menjalankan perintah yang ditentukan oleh atasannya sebagai supra desa. Keempat, adanya stigmatisasi dan *stereotype* atas masyarakat desa. Peristiwa kelabu pada bulan September 1965, peristiwa politik di lingkaran kekuasaan yang ledakannya melibatkan rakyat sebagai korban. Peristiwa itu menciptakan efek trauma yang luar biasa bagi orang desa, terutama karena tingkat kesadisan dan kekerasan olah pembunuhannya. Pasca peristiwa itu negara melembagakan adanya stigmatisasi atas masyarakat yang dianggap keluar

dari ‘disiplin’ kewarganegaraan yang digariskan. Selain stigmatisasi, negara juga menghadirkan konstruksi sosial yang bersifat stereotip atas masyarakat desa. Seperti stereotip bahwa orang desa itu lembek, tidak punya daya berkompetisi, kalau berdiskusi ngantur karena tidak memahami persoalan, tidak siap kalau diberi kewenangan dan seterusnya. (Sutoro, 2017).

Pembangunan Berkelanjutan yang di bawah kerah desa, sepenuhnya bukan semata-mata untuk kesejahteraan masyarakat, tetapi ada kepentingan yang sifatnya global. Sehingga, pembangunan masih menjadi konsep yang perlu di kritisi. Aliran *developmentalisme* yang dipenetrasi oleh lembaga donor seperti World Bank, Asian Development Bank, IMF, yang hanya berarti bagi negara yang dilabeli sebagai negara yang sedang berkembang (*Underdevelop Country*), kenyataannya hampir tidak pernah berhasil mengubah kondisi negara yang semula kondisinya sedang berkembang menjadi maju. Pembangunan/developmental sendiri lebih menitikberatkan pada pertumbuhan ekonomi sehingga wujud pembangunan di Indonesia, sebagai salah satu negara berkembang, lebih banyak berupa pembangunan fisik infrastruktur sehingga cerita sukses pembangunan tersebut selalu dikalkulasikan dengan angka-angka atau laporan-laporan. (Kurnia Novianti)

Tania Murray Li Dalam bukunya yang berjudul *The Will To Improve*, menyampaikan bahwa kehendak untuk mengembangkan pada kenyataannya tidak pernah menghasilkan apa yang dikehendaki. Ada kontradiksi dalam agenda yang diusahakan dan sesuatu yang dihasilkan. Konsep *Governmentality* yang diangkat Foucault merupakan gambaran model relasi kekuasaan yang berlaku dalam

masyarakat modern masa kini. Dalam masyarakat modern, menurut Foucault, kekuasaan tidak hanya dijalankan melalui *soverign power* atau *disciplinary power*, tetapi justru cenderung lebih menekankan pada cara-cara yang positif. *Governmentality* adalah perluasan kekuasaan dalam bentuk *disciplinary power*. Jika *disciplinary power* objeknya adalah tubuh individu, maka *governmentality* subjeknya adalah populasi (tubuh sosial). Hal lain yang disampaikan Tania Li adalah isu pembangunan di Indonesia sejak abad ke-19 tidak terlepas dari kehadiran pemangku kepentingan (*trustees*). Pembangunan selalu melibatkan pejabat kolonial dan misionaris, politikus dan birokrat, pemberi bantuan internasional, ahli-ahli pertanian, kesehatan, pemberi kredit, dan konservasi, serta organisasi-organisasi non-pemerintah yang beraneka ragam (*trustees*).

Cerita kelam pembangunan desa masa orde baru kemudian digantikan dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-undang ini hadir dengan menyajikan sederet solusi untuk negeri. Undang-Undang Desa mempunyai spirit demokrasi sosial, demokrasi politik, dan demokrasi ekonomi. Demokrasi sosial ditunjukkan dengan keberadaan desa sebagai representasi negara yang hadir mengatur dan melayani masyarakat. Demokrasi politik di representasikan dengan kepemimpinan kepala desa yang memiliki legitimasi mengakar, pemerintah desa yang akuntabel dan responsif, penyelenggaraan desa yang transparan, kontrol politik BPD kepada pemerintah desa, inklusi dan deliberalisasi, melalui musyawarah desa, partisipasi masyarakat, serta kewenangan yang aktif. Demokrasi ekonomi di tunjukan dengan kehadiran desa dalam mengkonsolidasi aset ekonomi, kebersamaan antara pemerintah desa

dan masyarakat dalam mengelola sumber daya ekonomi, distribusi ekonomi kepada masyarakat, serta akses partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi desa, (Sutoro, 2017)

Dengan adanya UU ini, desa tidak lagi berkedudukan sebagai pemerintah yang berada dalam sistem pemerintahan kabupaten/kota sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 200 UU Nomor 32 Tahun 2004. Tetapi desa memiliki pemerintahan sendiri yang berkedudukan dalam wilayah kabupaten/kota, sama halnya dengan keberadaan kabupaten/kota dalam wilayah provinsi. UU Nomor 6 Tahun 2014 menjadikan desa memiliki kewenangan sendiri dan bukan lagi menjadi residu dari pemerintahan di atasnya dalam mengelola pembangunan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa yang diatur dan diurus sendiri oleh desa. Dengan begitu, desa menentukan sendiri jalannya roda pemerintahan berdasarkan prakarsa dan kepentingan masyarakat desa. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan dilakukan bersama rakyat. Kehadiran UU Desa memberikan kemandirian terhadap desa yang secara substansial kemandirian desa sama dengan otonomi desa, yang secara formal memastikan kedudukan dan kewenangan desa yang ditetapkan oleh UU Desa dengan asas rekognisi dan subsidiaritas. Rekognisi (Pengakuan terhadap hak asal-usul) dan Subsidiaritas (Penetapan kewenangan berskala lokal) menjadi asas utama dalam penyelenggaraan undang-undang ini. Rekognisi hadir sebagai bentuk proteksi terhadap desa, bukan hanya proteksi kultural, tetapi juga memproteksi desa dari imposisi dan mutilasi yang dilakukan oleh supradesa, politisi dan investor.

Rekognisi dan subsidiaritas memberikan gambaran makna mengenai kemandirian dan otonomi desa. Secara garis besar otonomi berarti desa berdaulat secara politik, yang mempunyai kekuasaan dan otoritas untuk mengambil keputusan sendiri, sesuai dengan konteks kepentingan masyarakat setempat. Pertama, desa mempunyai kewenangan, perencanaan dan penganggaran sendiri untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Kedua, desa tidak semata menjadi penerima manfaat program-program pemerintah, melainkan mempunyai kapasitas sebagai subjek pemberi manfaat bagi masyarakat. Ketiga, desa mempunyai kemandirian dalam mengambil keputusan tanpa didikte oleh kekuatan luar. Kemandirian dalam hal ini mencakup prakarsa dan kewenangan desa. Prakarsa adalah pilihan dan kehendak desa sesuai dengan konteks, kepentingan dan aspirasi lokal. Sedangkan kewenangan akan memberikan dasar dan manfaat kepentingan desa: (a) Kewenangan desa dalam membuat urusan, masalah, dan aset lokal bisa diatasi secara tuntas di tingkat desa; (b) Kewenangan desa dalam membuat desa berfungsi atau bermanfaat untuk warga dan negara; (c) Kewenangan desa merupakan alat untuk mengarahkan dan memperkuat perubahan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa; (d) Kewenangan desa dalam mengarahkan dan memperkuat desa sebagai subjek pembangunan, sehingga akan tumbuh kemandirian desa; (e) Kewenangan desa akan membuat desa berdaulat secara politik dalam mengambil keputusan lokal sesuai dengan prakarsa dan kepentingan desa. (Sutoro *et al.*, 2017)

Berangkat dari pernyataan diatas, UU Desa hadir dengan dua asas utama yaitu rekognisi dan subsidiaritas mengubah masa lalu desa dengan memberikan

kemandirian terhadap desa sehingga desa memiliki kewenangan dalam mengatur dan mengurus desa sesuai dengan kepentingan dan aspirasi lokal. Kemandirian ini dimaksudkan tidak ada unsur campur tangan ataupun intervensi dari supra desa maupun pihak lain yang menyebabkan hilangnya kemandirian desa dan mengembalikan masa lalu desa.

Di sisi lain, *Sustainable Development Goals (SDGs)* hadir menggantikan Millenium Development Goals (MDGs) sebagai program pembangunan global yang disepakati oleh 193 negara anggota PBB termasuk Indonesia pada 2 Agustus 2015. *SDGs* hadir dengan memuat 17 tujuan program pembangunan dengan komitmen tidak ada satu orangpun yang terlewatkan (*No one left behind*) dengan jangka waktu pencapaian hingga tahun 2030. Indonesia sebagai salah satu negara yang menyepakati *SDGs* ini pun ikut berkomitmen untuk menerapkan *SDGs* ini sebagai program pembangunan berkelanjutan dengan 17 program dan 169 sasaran hingga tahun 2030. Komitmen Indonesia dalam mewujudkan pelaksanaan *SDGs* ini dibuktikan dengan menciptakan draft dokumen kerangka hukum bagi pelaksanaan *SDGs* dalam bentuk Peraturan Presiden. Pada tahun 2017 Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Dalam konteks nasional, *SDGs* yang berlingkup global diratifikasi di Indonesia menjadi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selanjutnya, kebijakan yang tertuang dalam peraturan presiden Nomor 59 Tahun 2017 ini dilakukan pengarusutamaan dalam semua kebijakan dan program pemerintah maupun *stakeholder* lainnya, mulai dari tingkat nasional sampai kelevel desa. Pelokalan ini bertujuan untuk membuka

kesempatan partisipasi dan kontribusi dari banyak pihak sehingga dapat mempercepat pencapaian target 2030. Pelokalan *SDGs* keranah desa ini membawa 18 tujuan program pembangunan, hal ini didukung dengan adanya Permendes PDTT Nomor 13 Tahun 2020 yang dimana pada tahun 2021, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Abdul Halim mengatakan bahwa Dana Desa pada tahun 2021 akan diprioritaskan untuk Pembangunan Nasional Berkelanjutan di desa atau disebut *Sustainable Development Goals (SDGs)* Desa. Hal ini sejalan dengan di keluarkannya Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021, yang dilatar belakangi oleh model pembangunan nasional yang berlandaskan Peraturan Presiden Nomor 59 tahun 2017. Selanjutnya, 18 program yang terdapat dalam *SDGs* desa ini yang kemudian mengharuskan seluruh desa di Indonesia agar dapat mengimplementasikannya.

Program pembangunan yang disepakati dunia dan lembaga internasional ini membawa 17 program utama. Tetapi program ini dilokalisasi ke dalam desa dengan menambah satu program yaitu Desa Dinamis dan Budaya Desa Adaptif. Terdapat 5 indikator dasar dalam program *SDGs* ini diantaranya; People (Manusia), Planet (Bumi), Prosperity (Kesejahteraan), Peace (Perdamaian), Patnership (Kemitraan). Konsep pengembangan *SDGs* berpijak pada tiga pilar utama, yaitu; *Pertama*, pembangunan manusia (*Human Development*), seperti pendidikan dan kesehatan; *Kedua*, lingkungan sosial ekonomi (*Social Economic Development*), seperti ketersediaan sarana dan prasarana lingkungan, serta

pertumbuhan ekonomi; *Ketiga*, lingkungan (*Environmental Development*), berupa ketersediaan sumber daya alam dan kualitas lingkungan yang baik.

Masuknya program *SDGs* ini ke dalam tubuh desa, menjadikan dana desa sebagai prioritas untuk membiayai kegiatan pencapaian *SDGs* Desa ini. Hal ini bertentangan dengan dua asas utama UU Desa. Dana desa sebagai bentuk asas subsidiaritas ini memberikan kewenangan bagi desa berinovasi dalam membangun desa sesuai dengan kepentingan lokal. Tetapi dengan kehadiran program pembangunan ini, dana desa diatur penggunaannya guna pencapaian program ini. Sehingga pemerintah desa menyesuaikan penggunaan dana desa untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang diatur oleh pusat.

Sutoro Eko sebagai salah satu bapak pendiri (*Founding Father*) UU Desa memberikan kritik terhadap *SDGs* Desa ini dalam video Youtubenya dengan sub pembahasan *SDGs* Desa “Sok Tahu Desa”, menjelaskan bahwa kehadiran *SDGs* ini adalah sebuah kontradiksi, karena rumusan-rumusan mengenai *SDGs* desa ini tidak ada dalam UU Desa. Dalam UU Desa kita mengenal asas Rekognisi dan Subsidiaritas yang menjadi proteksi bagi desa dari campur tangan dan intervensi pihak luar termasuk supra desa. Tetapi kehadiran *SDGs* ini bertentangan dengan asas rekognisi dan subsidiaritas yang membuat desa menjadi objek pembangunan. Serta *SDGs* ini menjadi kontradiksi karena tidak mempunyai legitimasi dalam UU Desa. Mengutip dari artikel Desapedia.id, Sutoro Eko menyampaikan 10 Salah Kaprah Pelaksanaan UU Desa. Beliau mengatakan bahwa negara lebih banyak mengatur daripada mengurus desa, lebih banyak mengawasi ketimbang membina desa. Alih-alih melakukan rekognisi dengan mengakui, menghormati dan



mempercepat, negara malah melakukan pengendalian dan pengaturan dengan birokratisasi dan regulasi sehingga yang sampai ke tangan desa bukan substansi UU Desa melainkan Permen dan Perbub yang banyak membatasi dengan kewajiban ketimbang memberkuasakan desa. Point lain yang menjelaskan bagaimana Negara berkuasa atas desa adalah alih-alih melembagakan dan menjalankan pendekatan kombinasi “Desa Membangun dan “Membangun Desa” negara malah menggunakan pembangunan yang dipikirkan melalui *SDGs* Desa untuk memerintah dan mengendalikan desa. Pendampingan desa menjadi pekerjaan yang mendampingi proyek dana desa dan *SDGs*, memburu data dan melayani menteri.

Kehadiran UU Desa menjadikan desa sebagai subjek dalam pembangunan desa itu sendiri, tetapi dengan kehadiran program *SDGs* Desa ini, desa bukan lagi sebagai subjek pembangunan melainkan menjadi objek dalam pembangunan itu sendiri. Direduksinya dana desa menjadi proyek dana desa untuk membiayai kegiatan *SDGs* Desa ini menjadikan pemerintah sebagai subjek dalam pembangunan itu sendiri dan masyarakat hanya sebagai objek, penerima atau klien dari program pembangunan ini. Kontradiksi kehadiran program pembangunan ini yaitu menjadi desa sebagai locus pembangunan dan masyarakat desa sebagai objek pembangunan. Melalui kehadiran program ini, negara terlalu jauh mengurus desa padahal desa itu sendiri mempunyai kewenangannya sendiri dalam mengatur dan mengurus desa.

*SDGs* sebagai produk pembangunan masuk ke dalam desa dengan membawa komitmen *No One Left Behind*. Jika di cermati secara kritis dengan

melihat program-program pembangunan sebelumnya dari masa orde baru, bisa dikatakan bahwa ketertinggalan yang terjadi sebenarnya karena pembangunan itu sendiri. Sehingga pembangunan itu sendiri menciptakan proyek-proyek berkelanjutan lainnya. Karena yang dilihat adalah seberapa banyak proyek-proyek yang dibangun yang cerita suksesnya dilihat dari hasil laporan-laporan proyek itu sendiri. Pembangunan desa memang menciptakan pertumbuhan tetapi pertumbuhan tersebut tidak merata, sehingga menciptakan ketimpangan. Dalam video lain yang bertajuk “Pembangunan; Kapitalisasi, Isolasi & Eksklusi” Sutoro eko menyampaikan 3 hal yang disoroti dalam pembangunan yang masuk ke ranah-ranah lokal atau desa bahwasannya : *Pertama*, Pembangunan yang masuk desa itu pada dasarnya mengintegrasikan desa, yang orientasinya adalah kapitalisasi (memupuk modal). Desa tidak dibangun melainkan melakukan eksploitasi dengan cara mengambil hasil bumi dan memanfaatkan tanah yang ada di desa. *Kedua*, Pembangunan yang betul-betul masuk desa adalah proyek. Kehadirannya mengisolasi masyarakat desa dengan menghibur mereka dengan mainan-mainan proyek dan melempar bantuan ke masyarakat desa. *Ketiga*, Kehadiran pembangunan malah justru melakukan eksklusi yang akhirnya meminggirkan dan memarginalkan desa. Pembangunan hadir dengan wujud selektif menciptakan diferensiasi yang menimbulkan diskriminasi. Karena tidak dijalankan dengan pendekatan konstitusi (*equality before the law*) sehingga menyebabkan pengulangan (ketertinggalan) yang terus berputar.

*SDGs* Desa sebagai program Pembangunan Berkelanjutan, menawarkan tujuan yang sangat mulia, yaitu kesejahteraan masyarakat, mengurangi

kemiskinan, lingkungan yang hijau, tingkat kesehatan dan kemakmuran yang lebih tinggi, keberlangsungan atau keberlanjutan hidup. Untuk mencapai tujuan ini negara memiliki cara-cara sendiri. Pada level masyarakat luas, pemerintah tidak mungkin memaksa dan mengatur secara detail tindakan mereka. Pemerintah melakukan upaya yang lebih halus, seperti mendidik kehendak dan merancang kebiasaan, keinginan dan kepercayaan masyarakat. Dengan demikian, masyarakat dikondisikan untuk mengikuti kehendak/perintah pemerintah atau negara yang seolah-olah berdasarkan keinginan mereka (masyarakat desa) sendiri.

Berdasarkan ungkapan di atas jika di analisis lebih jauh, *SDGs* Desa ini adalah pintu masuk negara untuk memerintah, mengendalikan desa dengan pembangunan melalui pemangku kepentingan (*trustees*). Pembangunan yang dilakukan *trustees* yang menjalin kerja sama dalam *trusteeship* yang memiliki kehendak yang membangun atau meningkatkan taraf hidup populasi untuk mencapai kesejahteraan, sungguh-sungguh merupakan utopia. Desa akan kembali seperti masa lalunya jika negara terus masuk, mengatur, mengintervensi dan memerintah desa. Kemandirian desa akan hilang meskipun secara legitimasi tersirat dalam UU Desa. Jika kita melihat pada masa pemerintahan orde baru, desa kehilangan kapasitas-kapasitasnya. Rakyat desa kehilangan kapasitas politiknya; Aparatur desa kehilangan kemampuannya di dalam menyelenggarakan pembangunan di desanya sendiri; Desa kehilangan kemampuannya mengurus tata produksi desa; Lembaga desa kehilangan kapasitas penyelenggaraan layanan publik di desa.

Sutoro Eko dalam video Youtubenya yang bertajuk “Salah Kaprah : Pembangunan Menjadi Mantra dan Tujuan” menyampaikan, kosa-kata pembangunan tidak dikenal dalam konstitusi, tetapi pembangunan menjadi mantra, dogma sekaligus menjadi tujuan dalam bernegara, dalam pemerintahan. Tetapi kehadirannya dibenarkan oleh para ahli, para teknokrat, mandor proyek, para pelaksana proyek yang memperoleh keuntungan dari proyek pembangunan. Pembangunan nasional menjadi mantra, sehingga pemerintah bekerja dengan pembangunan kemudian pembangunan membentuk pemerintahan. Pemerintahan pembangunan tidak mengutamakan pada pelayanan dan proteksi tetapi lebih mengutamakan pembangunan yang kemudian di definisikan, di ukur, di rencanakan, di biyai, dan di target sehingga kinerjanya di ukur dengan angka-angka yang bisa digunakan untuk laporan-laporan. Salah satu yang marak dibicarakan adalah kehadiran *SDGS* Desa ke dalam ranah desa yang menjadi mantra, dogma, dan tujuan bagi pusat atau kementerian yang mengurus desa. Bagi mereka *SDGs* adalah sebuah tujuan. Tujuan tersebut memanfaatkan dan memperlak desa sehingga desa menjadi lokasi, target, sebagai obyek sekaligus sebagai alat untuk mencapai tujuan mereka bukan tujuan desa.

*SDGs* Desa adalah kekuasaan yang membentuk pemerintahan. Kehadiran program pembangunan atau *SDGs* ini kedalam desa menjadikan desa terbelenggu oleh banyaknya aturan-aturan yang mengikat. Dengan diprioritaskannya penggunaan dana desa untuk pencapaian kegiatan *SDGs* ini, desa disibukan dengan urusan-urusan pembangunan, desa lebih banyak mengurus administrasi, perencanaan, pendataan hingga dengan pelaporan. Melalui kehadiran program ini

kedalam desa, pemerintah desa menjadi pekerja proyek kepanjangan tangan dari atas. Pemerintah memiliki tugas utama yaitu sebagai pemberi pelayanan kepada masyarakat (Distribusi) dan memberikan perlindungan kepada masyarakat (Proteksi). Sehingga dalam menjalankan tugasnya, pemerintah harus bisa mengedepankan pelayanan dan perlindungan masyarakat desa bukan sebagai pekerja proyek yang lebih banyak mengurus pembangunan ketimbang mengedepankan dua fungsi utamanya. Tetapi kehadiran program *SDGs* Desa ini kedalam desa menggeser hakekat fungsi pemerintahan sebagai pemberi pelayanan dan proteksi menjadi pemerintahan yang developmental yang mempunyai cara berpikir, bertindak yang semuanya ditentukan oleh pembangunan, yang orientasi utamanya adalah pertumbuhan, memperdayakan masyarakat tetapi fungsi proteksi dan pelayanan relatif kurang memadai dan digantikan dengan pembangunan.

*SDGs* Desa di Kalurahan Sambirejo telah berjalan selama 2 tahun, kehadiran program ini di Kalurahan Sambirejo membuat pemerintah kalurahan sibuk dengan urusan-urusan administrasi. Kehadiran program *SDGs* Desa ini dengan menunggangi dana desa yang diatur penggunaannya membuat desa kerepotan dan sibuk. Dengan diaturnya penggunaan dana desa untuk membiayai kegiatan *SDGs* ini, desa terpaksa melakukan penjabaran ulang terkait APBKAL yang sudah dibuat. Program-program yang dibuat desa terpaksa mengikuti aturan yang dibuat melalui Permendes No. 13 Tahun 2020 dan Permendes No. 7 Tahun 2021 tentang prioritas penggunaan dana desa 2021 dan 2022. Desa terpaksa menyesuaikan kembali APBKAL yang dibuat sebelumnya sesuai dengan ketentuan dari pusat tentang berapa persen dana desa digunakan untuk apa.

Permasalahan lain di Kalurahan Sambirejo ini terkait dengan *SDGs* Desa ini adalah terkait dengan kegiatan pendataan *SDGs* Desa yang rumit dan merepotkan. Pendataan *SDGs* Desa ini berbeda dengan pendataan-pendataan program lain yang masuk ke desa. Pendataan program *SDGs* ini indikatornya banyak dan sedikit rumit ditambah lagi dengan aplikasi pendukungnya tidak sepenuhnya berjalan dengan baik. Kehadiran aplikasi *SDGs* ternyata membuat desa kewalahan dan tambah sibuk dengan urusan pendataan. Sebelum adanya *SDGs* Dashboard yang sekarang, Aplikasi *SDGs* Desa terlebih dahulu hadir tetapi aplikasi tersebut tidak berlanjut dan digantikan oleh *SDGs* Dashboard. Hal inilah yang membuat desa tambah sibuk dan kewalahan dikarenakan data yang telah diinput ke dalam aplikasi tidak bisa dipindahkan ke dalam website *SDGs* Dashboard. Kehadiran *SDGs* Dashboard juga tidak sepenuhnya mendukung dengan baik kegiatan pendataan, berdasarkan pengalaman magang yang dilakukan penulis beserta keluhan dari beberapa perangkat desa bahwa *SDGs* Dashboard ini sering mengalami kendala eror sehingga perangkat desa harus bekerja ekstra dalam pengimputan data *SDGs*.

Permasalahan lainnya yang terjadi di Kalurahan Sambirejo adalah dengan kehadiran program *SDGs* Desa ini, beberapa program dari visi-misi Lurah tidak terlaksana dari dana desa. Karena dana desa 68% diatur penggunaannya oleh pusat. Contohnya di Kalurahan Sambirejo program beasiswa pendidikan untuk masyarakat desa tidak menggunakan dana desa serta tidak ada pembangunan infrastruktur seperti pembangunan jalan dari dana desa tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, kehadiran program pembangunan *SDGs* Desa ini dengan menunggangi dana desa sebetulnya adalah proyek dana desa yang menjadikan perangkat desa sebagai pekerja proyek dan masyarakat sebagai objek dari program pembangunan tersebut. Melalui kehadirannya, desa disibukkan dengan urusan-urusan administrasi mulai dari perencanaan, pendataan sampai dengan pelaporan. Sehingga kehadiran program *SDGs* Desa ini membentuk satu bentuk pemerintahan yaitu pemerintah yang developmental.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana *Sustainable Development Goals* Desa membentuk pemerintahan yang developmental di ranah desa di Kalurahan Sambirejo.

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan kontradiksi program pembangunan *Sustainable Development Goals* Desa, yang hadir menjadikan desa sebagai objek, lokus, fokus, dan target pembangunan yang kehadirannya menggeserkan hakekat fungsi pemerintahan oleh rakyat (*Government by people*) menjadi pemerintahan yang bercorak pembangunan (*Developmental Government*). Serta untuk mengetahui bagaimana intervensi Negara dan Pemerintah Supra-Desa melalui program *SDGs* Desa ini.

Adapun manfaat akademis penelitian untuk memberikan catatan kritis terhadap program-program pembangunan sebagai *project making* yang masuk ke ranah desa yang dapat mengubah hakekat pemerintahan. Penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai referensi bagi penelitian terkait. Serta memberikan

referensi terhadap akademisi beserta stakeholder lain untuk menilai dan memahami ulang tentang program pembangunan yang masuk keranah desa.

#### **D. Literature Review**

Pada *literature review*, penulis akan menggambarkan beberapa penelitian-penelitian terdahulu yang berdekatan atau berkaitan dengan topik penelitian yang sedang dilakukan.

1. Penelitian dilakukan oleh Kurnia Novianti dengan judul Kota Berkelanjutan: Antara Ide dan Implementasi dalam Perspektif Pemangku Kepentingan. Penelitian ini bertujuan untuk memotret perspektif para pemangku kepentingan tentang konsep kota berkelanjutan di dua kota, yaitu Rotterdam dan Jakarta. Kehadiran konsep kota berkelanjutan menarik diperdebatkan karena konsep ini relatif baru diwacanakan oleh para akademisi dan praktisi pembangunan di Indonesia. Konteks pembangunan berkelanjutan yang sejumlah indikatornya harus dipenuhi oleh Indonesia setelah mengadopsi *Sustainable Development Goals*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prespektif pemangku kepentingan tentang kota berkelanjutan. Pendekatan yang digunakan dalam tulisan ini adalah pendekatan *governmentality*. Adapun hasil dari penelitian ini adalah gerak ide tentang Jakarta menjadi “Kota Berkelanjutan” yang dilakukan oleh pemangku kepentingan dengan mengadopsi kebijakan Rotterdam ternyata belum menunjukkan hasil yang maksimal.
2. Penelitian dilakukan oleh Solikatun, Supono, Yulia Masrurroh, Ahmad Zuber, Dea dengan judul Kemiskinan Dalam Pembangunan. Penelitian



ini mengambil prespektif bahwa maraknya kegiatan perencanaan dan program-program pembangunan ternyata belum sepenuhnya mampu mensejahterakan masyarakat. Jika dilihat dari fenomena yang terjadi justru sebaliknya, jumlah kemiskinan semakin meningkat dan menciptakan ketimpangan. Berbagai macam program pengentasan kemiskinan telah diterapkan di Indonesia untuk mengatasi permasalahan kemiskinan ini sepenuhnya belum mampu menjawab persoalan tersebut. Salah satu faktor kegagalan pemerintah dalam mengatasi hal ini adalah kurangnya pemahaman pemerintah mengenai kemiskinan tersebut, strategi penanggulangan kemiskinan yang ada hampir semuanya sama.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Hanif Oktavia Trianahadi dengan judul *Governmentality* dalam Program Jalin Matra : Studi Kebijakan Pengentasan Kemiskinan Pemerintahan Soekarwo Periode 2014-2019 Jawa Timur. Penelitian ini menggunakan *governmentality* untuk melihat relasi setiap aktor dalam pelaksanaan Jalin Matra. Hasil dari penelitian ini penulis melihat bahwasanya pengentasan kemiskinan yang dilakukan hanya sebatas dengan masyarakat diberikan bantuan berupa uang tunai sebagai solusi untuk membawa masyarakat dari miskin menjadi tidak miskin.
4. Penelitian yang dilakukan oleh Alanuari Haryu Kharisma dengan judul Menuju Pembangunan Global Yang Demokratis: Kritik Wangari Maathai Terhadap Wacana Pembangunan Global. Penelitian ini

melihat bahwasannya agenda pembangunan yang selama ini disusun para pemimpin dunia belum dapat menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat secara merata, khususnya dalam mengurangi angka kemiskinan global. Salah satu program pembangunan global yaitu MDGs ternyata belum mampu mengatasi kemiskinan secara merata. Penyebab terjadinya kegagalan ini adalah tidak adanya aspek demokrasi dalam program pembangunan ini, negara kurang menghargai hak-hak masyarakat yang ada. Wacana pembanguna global yang ada hanya terlalu fokus terhadap peningkatan ekonomi saja.

5. Penelitian dilakukan oleh Azis Muslim dengan judul Analisis Kegagalan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat dalam Membangun Kemandirian Masyarakat Miskin (Studi Kasus di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur). Hasil temuan dalam penelitian ini adalah penanganan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah melalui PNPM ternyata gagal mencapai tujuannya. Peneliti menggambarkan faktor penyebab gagalnya program ini adalah buruknya kinerja fasilitator dan kesalahan *stakeholders* memahami tujuan PNPM. Kegagalan ini terjadi karena fasilitator bekerja dengan pragmatis dengan mengedepankan hasil daripada proses, program-program yang ada cenderung salah sasaran.
6. Penelitian yang dilakukan oleh Purbathin Hadi dengan judul Tinjauan Terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat Indonesia. Argumentasi

yang disampaikan peneliti adalah faktor-faktor penyebab kegagalan dari beberapa program pembangunan pengentasan kemiskinan yang ada di Indonesia adalah; Karena pendekatan yang digunakan adalah *target* dan *top-down*; pengabaian nilai-nilai lokal; kurangnya partisipasi; pendekatan yang tidak holistik dan Ilusi investasi.

7. Penelitian yang dilakukan oleh Abu Huraerah dengan judul Strategi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia. Argumentasi yang disampaikan peneliti dalam penelitiannya adalah, ada beberapa kesalahan yang menyebabkan kegagalan dari kebijakan pengentasan kemiskinan di Indonesia. Pertama, program pengentasan kemiskinan masih berorientasi pada aspek ekonomi daripada aspek multidimensional. Strategi kebijakan penanggulangan kemiskinan dengan fokus ini terbukti mengalami kegagalan. Karena fenomena kemiskinan sangat beraneka ragam, tidak hanya meliputi dimensi ekonomi. Kedua, lebih bernuansa karitatif (kemurahan hati) dibanding dengan produktivitas. Ketiga, lebih memposisikan masyarakat miskin sebagai objek daripada subjek. Keempat, pemerintah masih sebagai penguasa daripada fasilitator. Untuk mengoptimalkan program pengentasan kemiskinan, maka perlu memperhatikan beberapa aspek tersebut.

#### **E. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian merupakan suatu penentuan konsentrasi sebagai pedoman arah suatu penelitian dalam upaya mengumpulkan dan mencari informasi serta

sebagai pedoman dalam mengadakan pembahasan atau penganalisaan sehingga penelitian tersebut benar benar mendapatkan hasil yang diinginkan. Fokus penelitian juga merupakan batas ruang dalam pengembangan penelitian supaya penelitian yang dilakukan terarah dengan jelas.

Dengan demikian fokus penelitian dalam penelitian ini adalah membahas bagaimana *Sustainable Development Goals* Desa dalam membentuk pemerintahan yang *developmental* di ranah desa di Kalurahan Sambirejo.

## **F. Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual ini disusun dalam rangka memberikan jawaban secara teoritis terhadap pertanyaan penelitian serta menjadi acuan penulis dalam melakukan studi di lapangan. *Bagian pertama*, penulis akan melakukan tinjauan pustaka terhadap studi-studi yang sudah ada dan terkait. *Bagian kedua*, penulis akan memahami konsep *Developmentalisme* untuk melihat pembangunan yang masuk ke dalam desa. *Bagian ketiga*, penulis akan memahami konsep *governmentality* untuk melihat program pembangunan *SDGs* Desa. *Bagian keempat*, penulis akan merangkai konsep tersebut untuk menjawab rumusan masalah.

### *1. Developmentalisme*

Istilah *developmentalisme* berakar kata dari bahasa Inggris *development*, tambahan kata “*isme*” di belakang kata ini menunjukkan kuatnya ideologi yang dijalani. *Developmentalisme* secara sederhana diartikan sebagai pemahaman yang bermula dari ideologi kapitalisme. *Developmentalisme* digunakan secara acak dengan kata pembangunan

dalam makna yang sama, yakni model yang dicirikan sebagai produk kapitalisme pasca perang dunia II. Dawan Raharjo (2009) menyatakan bahwa *developmentalisme* adalah kemistri ideologis antara kepentingan industri maju dan kepentingan elite politik negara dunia ketiga. *Developmentalisme* merupakan kelanjutan dari program pemulihan ekonomi dunia ketiga. Motif utamanya adalah membendung pengaruh komunisme di negara dunia ketiga yang cenderung memilih bentuk sosialisme.

*Developmentalisme* merupakan teori pembangunan yang telah menjadi sebuah ideologi. Pada dasarnya *developmentalisme* disusun dari kata *development* dan *isme*. Imbuhan *isme* dibelakang kata *development* ini menunjukkan bahwa teori ini sangat kuat dan besar, sehingga banyak negara berkembang di dunia mengadopsinya. Ideologi *developmentalisme* ini dibangun atas teori modernisasi, yang beranggapan bahwa manusia akan selalu berjalan linear dari tradisionalitas menjadi modern.

Teori pembangunan yang lebih dikenal dengan paham *developmentalisme* selain dikembangkan dalam rangka membendung pengaruh dan semangat anti kapitalisme bagi rakyat dunia ketiga juga merupakan siasat baru untuk mengganti formasi social kolonialisme yang baru runtuh. Diskursus *developmentalisme* yang lahir tahun 1949 telah resmi menjadi doktrin kebijakan luar negri Amerika Serikat. *Developmentalisme* dilontarkan dalam era perang dingin untuk membentuk sosialisme, sehingga ia merupakan bungkus baru dari

kapitalisme. Konsep pembangunan dan modernisasi yang kemudian dianut oleh rakyat dunia ketiga pada dasarnya merupakan refleksi dari paradigma barat tentang perubahan social. Development diidentikkan dengan gerakan langkah demi langkah menuju higher modernity. Modernitas dimaksudkan merefleksi bentuk perkembangan dan kemajuan teknologi serta ekonomi seperti yang dialami oleh Negara-negara industry. Konsep ini mempunyai akar sejarah dan intelektualitas perubahan social yang diasosiasikan dengan revolusi industry di Eropa. Interpretasi konsep pembangunan di sebagian besar dunia ketiga difahami sebagai general improvement in the standard of living.

Di Indonesia, kata pembangunan sudah menjadi kata kunci bagi segala hal. Secara umum, pembangunan diartikan sebagai usaha untuk memajukan kehidupan masyarakat dan warganya. Namun secara sempit dapat diartikan disini yaitu tentang kemajuan material semata, maka sering kali orientasi pembangunan hanya menyentuh dan membahas bidang ekonomi saja. Namun dari realita sosial yang terjadi, ada dua golongan yang dapat diklasifikasikan berdasarkan orientasi pembangunan, yaitu adanya golongan orang yang sukses dari pembngunan dan adanya golongan yang teraniaya kehidupannya karena pembangunan. Dampak dari adanya pembangunan dan modernisasi yang diharapkan adalah untuk mensejahterakan warga masyarakat bagi masing-masing negara. Namun selain dampak yang menguntungkan, ternyata terdapat dampak yang buruk bagi sebagian golongan masyarakat. Tujuan dari pembangunan bagi

bangsa Indonesia adalah untuk mengentaskan kemiskinan dan membuat bangsa Indonesia menjadi bangsa yang maju dan tidak menjadi negara yang diremehkan dan ditindas oleh negara lain yang lebih superior. Kenyataan pahit ini harus kita terima bahwa pembangunan yang dilaksanakan di Indonesia belum menampakkan hasil yang optimal sehingga di Indonesia termasuk kedalam negara yang miskin.

Sejarah kemenangan bagi aliran *developmentalisme* yang dianut oleh rezim orde baru ini di Indonesia diawali dari lengsernya presiden Soekarno. Rezim orde baru sangat bersahabat dengan ideologi *developmentalisme* ini. Ideologi ini dirangkul oleh rezim orde baru dengan maksud merubah Indonesia menjadi negara maju, selayaknya Jepang yang maju karena mengadopsi secara total ideologi ini. Karena *developmentalisme* ini bertujuan untuk memodernisasikan masyarakat dengan segala aspek kehidupan yang berjalan bersamaan dengannya, *developmentalisme* ini seringkali mengalami kontradiksi dengan tradisionalitas. Beberapa petani di desa yang menolak untuk mengadopsi ideologi ini. Hal ini dikarenakan indikator kemajuan yang ditawarkan oleh *developmentalisme* bertolak belakang dengan nilai-nilai sosial-budaya yang telah masyarakat desa pegang teguh selama berabad-abad. Kejayaan *developmentalism* di Indonesia sejak dekade 1960-an ini karena ditopang oleh tiga kekuatan besar yaitu ABRI, Birokrasi dan Golkar, namun meskipun ketiga unsur ini menggawangi rezim orde baru dengan slogan

pembangunannya yang *developmentalism* namun akhirnya runtuh ketika stabilitas politik, ekonomi dan aspek lainnya yang sudah tidak menentu.

*Developmentalisme* ini hadir dengan nama lain sebagai sebuah proyek yang merasuk kedalam batang tubuh kebijakan dalam dunia pertanian di desa. Masa rezim orde baru program BIMAS, INMAS, dan berbagai program pendukung kebijakan Revolusi Hijau adalah perwujudan dari pengadopsian ideologi ini di lapangan. Karena besarnya penolakan yang dilakukan oleh masyarakat pada awal kelahiran ideologi ini di Indonesia, di lapangan pemerintah orde baru menggunakan kekuatan politik dan militer (*dwifungsi* ABRI) untuk menekan masyarakat dan petani..

Penganut *developmentalism* sangat percaya bahwa pembangunan adalah pilihan mutlak untuk menciptakan kesejahteraan penduduknya. Pemahaman tentang pembangunan sering kali diasumsikan sebagai sesuatu yang dapat menyelesaikan segala persoalan yakni kemiskinan, keterbelakangan, dan masalah-masalah ekonomi dan industri yang dianggap sebagai *agent of change* sebagai perubahan dalam pembaharuan hidup. Mansour Fakieh mengatakan penganut-penganut teori ini percaya bahwa segala sesuatu menuju perubahan dapat dicapai dengan pembangunan (*developmentalism*), mereka percaya bahwa tradisionalisme dianggap sebagai masalah dan harus disingkirkan segera. Hanif Suranto (2006), mengatakan bahwa paradigma *developmentalism* yang menjadi landasan pembangunan bagi negara-negara dunia ketiga ternyata telah



melahirkan sejumlah problem yang dihadapi berbagai komunitas. Hancurnya identitas kultural dan perangkat kelembagaan yang dimiliki komunitas akibat penyeragaman, hancurnya basis sumber daya alam komunitas akibat eksploitasi oleh negara atas nama pembangunan, melemahnya kapasitas komunitas dalam menghadapi problem-problem komunitas akibat dominasi negara. Beberapa problem tersebut adalah hasil dari pembangunan *developmentalism*.

Sejalan dengan apa yang dikatakan Hanif Suranto, beberapa pakar dari perguruan tinggi di Indonesia seperti IPB dan UGM menganggap *developmentalisme* telah berdampak negatif terhadap sosial-budaya pertanian dan pedesaan. Hilangnya tatanan kultural ini adalah indikasi dari diterapkannya ideologi berindikator barat (modernisasi) tersebut. Sehingga kondisi seperti inilah yang diharapkan oleh para pencetus paham *developmentalism*, sehingga mereka mampu masuk dalam kehidupan masyarakat untuk mengambil keuntungan pribadi.

Salah satu strategi yang digunakan dalam teori *developmentalisme* untuk mengembangkan sebuah negara adalah melalui intervensi, salah satu wujudnya adalah foreign aid atau bantuan luar negeri. Berdasarkan beberapa bentuk achievement negara di dunia, biasanya yang menjadi tujuan utamanya adalah mencapai kesejahteraan di bidang ekonomi. *Developmentalisme* menawarkan sebuah cara mengembangkan kondisi ekonomi di negara ketiga dengan melalui bantuan luar negeri dari negara maju atau negara dunia pertama ke negara dunia ketiga. Hal ini tentu

terlihat menguntungkan bagi negara dunia ketiga, namun ini juga dapat mengakibatkan negara yang menerima bantuan luar negeri tidak dapat mandiri secara ekonomi dan terus bergantung pada negara pemberi bantuan.

Pembangunan pedesaan yang dibawa oleh penganut developmentalism masa orde baru dapat diamati dari berbagai perspektif dan dari sudut pandang aktor yang berkepentingan dalam memahami desa. Bagi pemerintah pembangunan pedesaan dimaksudkan untuk bisa menempatkan desa dalam kerangka kepentingan pemerintahan yakni sebagai bagian dari basis kekuatan sosial politik dan kekuasaan. Karenanya pemerintahan desa sebagaimana UU No. 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa pada dasarnya adalah alat negara untuk mengontrol desa agar sesuai dengan keinginan dan pemaknaan pembangunan pemerintah. Program pembangunan revolusi hijau merupakan salah satu contohnya, Negara memaknai pembangunan sebagai upaya untuk mengentaskan kemiskinan, kelaparan dan mensejahterakan masyarakat desa. Namun, tersebut malah menghasilkan dampak sosial budaya bagi masyarakat desa. Kehadiran program pembangunan di ranah desa juga disertai dengan intervensi yang dilakukan oleh negara, negara melakukan intervensi di berbagai bidang seperti bidang pertanian, bidang kesehatan dan bidang ekonomi.

Banyak sekali ketimpangan dari teori pembangunan (developmentalism) yang di dewakan Indonesia pada masa orde baru.

Ketimpangan tersebut disebabkan karena watak pemerintah pada saat itu menganggap bahwa pembangunan adalah hal yang mutlak dilakukan tanpa memperhatikan aspek lain yang dirugikan oleh pembangunan tersebut. Pembangunan berkelanjutan yang pernah dicanangkan di Indonesia tidak punya waktu yang jelas dan tidak terukur sehingga hal tersebut menimbulkan polemik dibidang ekologi karena dengan program pembangunan yang terus berlangsung tanpa jangka waktu maka secara otomatis bidang ekologi menjadi sasaran empuk untuk dijadikan ladang eksploitasi demi kejayaan pembangunan. Para stakeholders di Indonesia pada masa orde baru adalah bahwa pembangunanisme yang berkedok ingin membantu kita keluar dari masalah ternyata malah menimbulkan banyak sekali masalah kehidupan seperti kemiskinan, ketimpangan, ketidakadilan dan kemarjinalan desa-desa di Indonesia.

The Will to Improve karya Tania Murray Li (2012), dalam pokok pembahasan Proyek, Praktik, Dampak. Dijelaskan bahwasannya serangkaian program pembangunan yang bertujuan untuk perbaikan yang di terapkan di daerah pegunungan Sulawesi Tengah. Direncanakan oleh Misionaris, ilmuan, pejabat kolonial, dan pejabat orde baru. Program-program yang dibawa tersebut bertujuan untuk memindahkan penduduk dari pegunungan dan memukimkan mereka di kawasan lembah, membuat batas tegas atas kawasan hutan, serta meningkatkan produksi. Program-program ini dirancang oleh para wali masyarakat berangkat dari prinsip kepengaturan yang tujuan mereka adalah mengoptimalkan proses-proses

serta hubungan-hubungan yang ada guna menjamin kesejahteraan masyarakat dengan menciptakan berbagai keadaan baru yang anggapan mereka bahwa program-program tersebut mampu mengarahkan perilaku masyarakat sasaran menjadi lebih baik. Namun, program-program yang digambarkan tadi tidak terlaksana sesuai rencana. Program pemindahan penduduk tidak menghapus klaim masyarakat pegunungan terhadap wilayah leluhur mereka di pegunungan, juga tidak sanggup menempatkan secara pasti penduduk pegunungan di tanah lembah seluas dua hektar. Pembuatan tapal batas hutan pun tidak menjamin pelestarian hutan. Peningkatan teknik pertanian juga tidak berhasil menstabilkan usaha tani keluarga malah mendorong privatisasi lahan dan pembentukan modal, (Li, 2012 : 174).

Di sisi lain program pembangunan yang masuk desa sejak 1970-an memang menampilkan sederet “cerita sukses” yang luar biasa. Sebagian besar desa-desa di Indonesia mengalami perubahan fisik, desa jauh lebih terbuka, dengan jalan-jalan yang mulus, irigasi yang lancar, penerangan lingkungan yang memadai, sarana transportasi dan seterusnya. Pada level mikro, pembangunan (modernisasi) telah mendorong mobilitas sosial penduduk desa. Banyak tempat tinggal penduduk desa yang memadai, banyak yang berhasil menjadi guru, pejabat, dosen, dokter, dan lain-lain. Tetapi “cerita sukses” itu tidak merata di semua tempat. Meskipun menciptakan mobilitas sosial, pembangunan desa yang digerakkan oleh negara tidak cukup memadai sebagai kekuatan untuk perubahan dan

transformasi sosial. Perubahan kultural, institusional dan struktural tidak terjadi secara signifikan. Pertanian mengalami involusi, petani gurem bertambah banyak, tanah rakyat berkurang banyak, sementara tanah korporasi bertambah banyak. Desa juga tidak memberikan sumbangan secara fundamental untuk rakyat, kecuali hanya mengeluarkan surat, membantu penyaluran bantuan pemerintah, dan sebagai basis kemasyarakatan. Dan banyak kepala desa memiliki kekayaan lebih karena perannya sebagai pemburu rente dan broker, tetapi desa sebagai institusi tidak bermanfaat untuk rakyat, (Sutoro dkk, 2017:37-38).

Perkembangan masyarakat desa sebagai proses transformasi sosial masyarakat desa dapat dipahami sebagai proses evolusi jika dilihat dari dimensi waktu. Dari masyarakat tradisional menuju modern, masyarakat homogeni ke heterogen dari fused ke refracted, dari kurang terspesialisasi ke terspesialisasi. Namun, memahami transformasi pedesaan tidak bisa lepas dari proses interaksi desa dengan kekuatan lain diluar desa. Oleh karena itu, pandangan neo Marxist bisa menjelaskan didukung oleh pandangan antropologi pembangunan dimana dari proses interaksi itu menghasilkan subordinasi desa atas negara dari sisi struktural maupun kultural. Hal ini terjadi karena pembangunan sebagai agen perubahan sosial pedesaan sering kali juga menjadi agen kapitalisme global yang membawa nilai neo liberalism. Karenanya memahami perubahan sosial pedesaan akan ditemukan perbenturan kelembagaan termasuk nilai-nilainya antara desa melawan negara (pembangunan) dan kapitalis global serta

perbenturan kepentingan lokal desa dan kepentingan pembangunan negara dan kapitalis yang cenderung menjadikan desa sebagai ranah untuk eksploitasi sumberdaya, baik alam maupun manusia dan menjadikan mereka sekaligus sebagai target pasar. Perbenturan kepentingan lokal dan supralokal ini akan dialami lebih hebat oleh masyarakat adat daripada masyarakat desa terbuka/termodernisasi. Pada akhirnya relasi kuasa lokal dan supralokal akan membawa desa dan adat menjadi termarginalisasi, (Yunindyawati,2014)

## 2. *Governmentality*

Kata pembangunan selalu diartikan sebagai kehendak untuk memperbaiki. Sehingga banyak pihak yang turut berperan dalam kehendak untuk memperbaiki ini. Mereka menempatkan diri sebagai wali masyarakat, yang klaimnya merekalah yang tahu tentang bagaimana masyarakat hidup, apa yang terbaik bagi masyarakat. Tujuan mereka sangat baik, bahkan cenderung utopis. Mereka ingin membuat dunia menjadi lebih baik dari sebelumnya, mengubah kehidupan masyarakat yang tradisional menjadi modern. Metode mereka subtil (halus). Kalaupun terpaksa menempuh kekerasan, cara itu dilakukan atas nama sesuatu yang mulia demi kepentingan orang banyak, kelangsungan hidup umat, atau untuk merangsang pertumbuhan. Sering kali program mereka beroperasi jarak jauh. Banyak program pembangunan yang tampak tumbuh secara alamiah dari interaksi sosial sehari-hari.

Dalam buku *The Will to Improve* karya Tania Murray Li (2012), kegagalan pembangunan dapat dipahami melalui konsep Foucault tentang “kepengaturan” (*Governmentality*). Pembangunan sebagai kehendak untuk memperbaiki mengandung dua hal penting. Pertama, problematisasi, yaitu langkah pengenalan berbagai kekurangan yang perlu dibenahi. Kedua, teknikalisisi permasalahan, yaitu serangkaian praktik yang menampilkan urusan yang hendak diatur sebagai suatu ranah yang muda dimengerti, yang tegas cakupannya, jelas ciri-cirinya, menentukan batas tepinya, agar tampak unsur-unsur di dalamnya, mengumpulkan informasi mengenai unsur-unsur tersebut dan mengembangkan teknik untuk menggerakkan kekuatan serta unsur-unsur yang disebutkan. Teknikalisisi permasalahan melihat setiap masalah sebagai persoalan teknis yang nonpolitis, sehingga masalah kesenjangan ekonomi-politik seringkali diabaikan dalam diagnosis dan resep-resep program. Kehadirannya sebagai niat baik serta rencana hebat untuk memakmurkan kehidupan banyak sama sekali bukan jaminan bahwa kemakmuran tersebut akan benar terwujud. Pada banyak peristiwa, alih-alih mendatangkan kemakmuran pembangunan sebagai “kehendak untuk memperbaiki” kehidupan ternyata justru membawa sengsara berkepanjangan.

Konsep *governmentality* yang diangkat Foucault merupakan gambaran model relasi kekuasaan yang berlaku dalam masyarakat modern kini. Dalam masyarakat modern kini, menurut Foucault, kekuasaan tidak hanya dijalankan melalui *soverign power* atau *disciplinary power*, tetapi

justru cenderung lebih menekankan pada cara-cara yang positif. Substansinya sebenarnya sama dengan *disciplinary power*, yakni kekuasaan itu dijalankan terhadap tubuh dengan membentuknya menjadi tubuh yang patuh dan berguna, yang hanya dapat diketahui melalui efek-efek dari kekuasaan itu. *Governmentality* adalah perluasan kekuasaan dalam bentuk *disciplinary power*. Jika *disciplinary power* objeknya adalah tubuh individu, maka *governmentality* subjeknya adalah pada populasi (tubuh social).

*Governmentality* merupakan mekanisme berlangsungnya kekuasaan dalam relasi kekuasaan. Artinya, ia bukan hanya gambaran bagaimana negara mengontrol masyarakat atau bagaimana negara mengendalikan populasi dengan memanipulasi pengetahuan dan kebenaran, atau gambaran mengenai bagaimana populasi dapat menghasilkan praktek yang dikehendaki oleh negara. *Governmentality* merupakan gambaran tentang mekanisme berlangsungnya kekuasaan dalam setiap relasi sosial sehingga tidak bisa direduksi sebagai manifestasi relasi masyarakat dengan negara. Relasi sosial antar individu juga dapat merefleksikan mekanisme *governmentality*. Terlebih lagi upaya mengidentifikasi berlangsung tidaknya mekanisme *governmentality* melalui ada tidaknya perlawanan kelompok subordinat terhadap kelompok dominan merupakan bentuk simplifikasi mekanisme itu.

Dalam *governmentality*, pemerrintahan adalah seni. Pengarahan perilaku dengan moda penalaran yang diperhitungkan. Rakitan yang



dibentuk oleh lembaga, prosedur, analisis dan refleksi, perhitungan dan taktik yang memungkinkan pelaksanaan bentuk kekuasaan yang sangat spesifik yang memiliki target adalah populasi, sebagai bentuk pengetahuan utamanya adalah ekonomi politik dan sebagai sarana teknis pentingnya adalah aparat keamanan (Thomas Lemke,2002; Bob Jessop, 2007, Tania Li, 2007). *Governmentality* mengandung kehendak, mentalitas dan rasionalitas memerintah untuk tujuan perbaikan. Dengan demikian, kita melihat bahwa pemerintahan adalah pemerintah dengan tujuan tertentu, sehingga untuk mencapai tujuan ini, ada praktik-praktik tertentu yang harus mengarah pada tujuan ini.

#### **G. Metode Penelitian**

Penelitian merupakan suatu cara untuk menjawab dan menggambarkan suatu fenomena yang sedang terjadi secara ilmiah, dalam suatu penelitian selalu menggunakan metode yang digunakan secara menyeluruh untuk dapat menghasilkan penelitian yang tepat sehingga hasil suatu penelitian dapat dikatakan ilmiah. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Metode Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan postpositivisme atau interpretatif, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah instrumen kunci, teknik pengumpulan data yang dilakukan secara triangulasi (gabungan observasi, wawancara, dokumentasi), data yang diperoleh cenderung kualitatif, analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif bersifat untuk memahami makna, memahami keunikan, mengkonstruksi fenomena, dan menemukan hipotesis (Sugiyono, 2018:9).

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian *kualitatif interpretatif*. Penelitian interpretatif adalah penelitian yang menafsirkan atau memahami pengalaman manusia sebagai fenomena serta mengkonstruksi atau memberi makna dan label atas fenomena yang diteliti. Pada konteks ini peneliti akan menggambarkan fenomena pembentukan developmental government melalui *SDGs* Desa di ranah desa.

Alasan peneliti memilih jenis penelitian ini adalah, untuk memotret dan mengungkapkan fakta lapangan terkait bagaimana pembentukan Pemerintahan yang developmental melalui program pembangunan *Sustainable Development Goals* Desa (*SDGs* Desa). Dalam menjelaskan hal tersebut melalui *SDGs* Desa di Kalurahan Sambirejo ini peneliti terlibat langsung dalam kegiatan observasi partisipatif (magang).

Sekitar satu bulan lebih peneliti melaksanakan magang di Kalurahan Sambirejo, peneliti dilibatkan langsung dalam kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pendataan *SDGs* Desa. kegiatan magang ini memberikan banyak pelajaran dan pengalaman peneliti, sehingga peneliti bisa melihat bagaimana bentuk pembangunan yang hadir ke desa dalam hal ini *SDGs*.

Peneliti melakukan kegiatan magang dengan tujuan untuk menambah pengalaman dan wawasan sekaligus untuk mempermudah peneliti untuk memperoleh data penelitian untuk menjawab rumusan masalah yang ada. Selama kegiatan magang, hal-hal yang dilakukan peneliti adalah membantu perangkat Kalurahan Sambirejo, salah satunya kegiatan yang berkaitan dengan administrasi. Sambil melaksanakan magang, peneliti memanfaatkan waktu

untuk berbincang dan berkenalan dengan perangkat Kalurahan. Selama magang, hal yang peneliti rasakan adalah, peneliti merasa sangat senang bisa diterima dengan baik di Kalurahan Sambirejo ini, apalagi peneliti yang bukan asli daerah Jawa yang mempunyai kultur dan bahasa yang sangat berbeda. Selama pelaksanaan magang, banyak hal yang didapatkan oleh peneliti, pengalaman yang didapatkan peneliti ini sangat bermanfaat bagi pribadi peneliti. Banyak hal yang peneliti belum dapatkan sebelum adanya magang ini. Peneliti sangat berterima kasih kepada seluruh perangkat kalurahan Sambirejo, pengalaman ini sangat berharga dan berarti bagi peneliti sendiri.

#### 1. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara serta dokumentasi.

*Observasi*, proses memperoleh data dan informasi dengan melakukan pengamatan langsung terhadap obyek penelitian. Menurut Sugiyono, observasi adalah suatu proses penelitian dengan mengamati suatu kondisi dari bahan-bahan pengamatan. Metode yang digunakan peneliti adalah *observasi partisipan*. Peneliti terjun langsung ke dalam lingkungan pemerintah Kalurahan Sambirejo melalui proses magang untuk mengetahui keseharian para pemerintah.

*Wawancara*, Estenberg (2002) wawancara adalah pertemuan antara dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara adalah cara menghimpun bahan keterangan yang dilakukan dengan tanya

jawab secara lisan dan dengan arah serta tujuan yang telah ditetapkan (Anas Sudjino, 1996). Dengan melakukan wawancara peneliti dapat menggali informasi yang sedalam-dalamnya sehingga memperoleh keterangan secara mendalam dari objek penelitian. Peneliti menggunakan teknik ini dalam mengumpulkan data dan informasi melalui wawancara secara langsung dengan informan. Kata-kata ataupun komentar yang dihasilkan oleh informan menjadi data primer peneliti. Di era modern ini, komunikasi dapat dilakukan dengan berbagai cara bisa lewat telepon, SMS, Email dan lain sebagainya. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara langsung tatap muka dan juga terkadang melalui teknologi modern seperti Via Whatsapp.

**Tabel 1.1 Data Informan**

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Jenis Kelamin</b>	<b>Tingkat Pendidikan</b>	<b>Jabatan</b>
1	Wahyu Nugroho, S.E	Laki-Laki	Sarjana	Lurah
2	Mujimin, S.Sos	Laki-Laki	Sarjana	Carik
3	Rantini	Perempuan	-	Pangripta
4	Tarini	Perempuan	-	Tata Laksana
5	Abdul Azis, S.E	Laki-Laki	Sarjana	Staff Kesekretariatan
6	Ardiyansah Riyan P	Laki-Laki	-	Staff Pangripta
7	Sriyanto	Laki-Laki	-	Staff Kamituwa
8	Teguh Widodo	Laki-Laki	-	Dukuh

No	Nama	Jenis Kelamin	Tingkat Pendidikan	Jabatan
				Sumberwatu
9	Maryono	Laki-Laki	-	Dukuh Gunungsari
10	Ibu Ratmi	Perempuan	-	Masyarakat
11	Ibu Ningsih	Perempuan	-	Masyarakat
12	Bapak Ahmadi	Laki-laki	-	Masyarakat

*Dokumentasi*, Menurut Suharsimi Arikunto (2002) metode dokumentasi adalah mencari data yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda dan sebagainya. Hadari Nawawi (2005) menyatakan bahwa studi dokumentasi adalah cara pengumpulan data melalui peninggalan tertulis terutama berupa arsip-arsip dan termasuk juga buku mengenai pendapat, dalil yang berhubungan dengan masalah penyelidikan. Adapun dokumen yang dikumpulkan dalam penelitian ini yaitu Undang-Undang, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Buku Monografi desa, Buku-Buku, Artikel, Jurnal, dan konten Youtube yang berkaitan dengan konteks penelitian.

Setelah semua data terkumpul baik dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi kemudian peneliti melakukan analisis dengan menggunakan kerangka konsep yang telah diuraikan

## 2. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis data di lapangan Miles dan Huberman. Aktivitas

yang dilakukan dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh (Miles dan Huberman, 1984). Aktivitas dalam analisis data yaitu : *data reduction, data display* dan *conclusion drawing/ verification*.

a. Reduksi Data

Reduksi data (data reduction) merupakan merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan hal-hal yang penting serta dicari dan tema yang pokok sekaligus penyederhanaan data yang muncul dari hasil lapangan. Reduksi data memberikan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan penulis dalam melakukan penelitian. Reduksi data penulis melakukan pengkodean terhadap data yang dihasilkan di lapangan. Kode tersebut bertujuan untuk memilih mana data yang dibuang, mana pola-pola yang dapat dijadikan sebagai hasil penelitian, meringkas terhadap cerita-cerita yang berkembang dan mana data yang tidak menyangkut dengan tujuan penelitian. Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, abstraksi dan transformasi data kasar yang diperoleh ketika di lapangan kemudian dikelompokkan, dibuang data yang rasa tidak perlu dan diambil kesimpulan akhir dari pada analisis tersebut (Salim,2006:22).

b. Data Display

Setelah direduksi, maka langkah selanjutnya adalah melakukan penyajian data. Penyajian data merupakan deskripsi kumpulan informasi yang tersusun untuk melakukan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan (Salim,2006:23). Penyajian data dapat dilakukan dengan menggunakan tabel, grafik, pie chart, pictogram dan lain lain. Dengan demikian, cara yang dilakukan oleh penulis untuk memudahkan dalam meraih data yang akurat dan sesuai dengan tujuan penelitian. Tahap kedua ini, penulis melakukan kategorisasi data atau pengelompokan data ke dalam klasifikasi-klasifikasi setelah data didapat di lapangan dan setelah diberi kode terhadap data tersebut.

c. Conclusion Drawing/Verification

Alur terakhir yang dilakukan dalam menganalisis data adalah menarik kesimpulan dan verifikasi (conclusion drawing and verifikasication) data yang telah dilalui pada tahap pertama dan kedua. Pada tahap ini penulis telah mulai mencari makna dari setiap gejala yang terjadi dan data yang diperoleh ketika di lapangan. Tahap kesimpulan penulis mencatat keteraturan, pola-pola mengenai penjelasan, alur kausalitas, proposisi dan konfigurasi. Persiet dalam penelitian ini ketika mengambil kesimpulan bersifat longgar, terbuka dan skeptis, akan tetapi

data dan kesimpulan tersebut sudah disediakan. Selama di lapangan ketika melakukan penelitian berlangsung penulis melakukan tahap kesimpulan secara terus-menerus. Kemudian data tersebut menjadi benar benar data yang valid dan kokoh dalam setiap kesimpulan. Penarikan kesimpulan selama di lapangan, penulis juga melakukan verifikasi. Verifikasi dilakukan penulis secara singkat dan membuka kembali hasil catatan di lapangan yang dilakukan secara terus-menerus. Analisis data yang digunakan diharapkan dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal.

### 3. Metode Penyajian Data

Dalam penelitian ini, peneliti menyajikan data dalam bentuk tabel, gambar dan narasi yang peneliti susun berdasarkan hasil temuan di lapangan maupun dalam bentuk literatur yang peneliti gunakan. Data yang disajikan oleh peneliti berupa temuan data hasil wawancara, observasi dan data dokumentasi yang peneliti dapatkan.



## **BAB II**

### **PROFIL KALURAHAN SAMBIREJO**

#### **A. Sejarah**

Kalurahan Sambirejo terletak di Kapanewon Prambanan Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta. Sejak di terbitkannya Perda No 8 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Daerah Istimewa Yogyakarta dan Penggunaannya, maka nama desa berubah menjadi Kalurahan, Kecamatan menjadi Kapanewon, Camat menjadi Panewu, Kepala Desa menjadi Lurah, serta Perangkat Kalurahan lainnya. Kalurahan Sambirejo merupakan Kalurahan yang menjunjung tinggi adat istiadat serta melestarikan nilai seni, dan sopan santun.

Sejak awal berdirinya pada hari Kamis Kliwon, 27 April 1927 sampai saat ini, Kalurahan Sambirejo atau yang dikenal sebelumnya Kalurahan Groyokan ini telah dipimpin oleh enam kepala kalurahan. *Pertama*, dipimpin oleh Mbah Wongso Sumito dari tahun 1927 sampai dengan sekitar tahun 1945. Terpilihnya beliau sebagai pemimpin desa melalui salah satu proses demokrasi yaitu musyawarah yang dilakukan oleh para tokoh-tokoh masyarakat. Dalam perjalanannya, setelah memasuki era Indonesia merdeka, baru diadakannya penggabungan kalurahan di Kecamatan Prambanan Kabupaten Sleman yang sudah di atur oleh regulasi. Setelah digabung beberapa ternyata Kalurahan Sambirejo ini tidak bisa gabung dengan kalurahan lainnya. Alasannya adalah karena

Lurah Sambirejo ini dikatakan miskin, banyak masalah, lokasi desa yang berada di pegunungan, warganya yang miskin, akses jalan belum ada sehingga mereka menganggap jikalau digabungkan maka akan merepotkan mereka. Sehingga terbentuknya Kalurahan Sambirejo ini bukan atas dasar gabungan dari beberapa desa melainkan berdiri sendiri. *Kedua*, setelah terbentuknya Kalurahan Sambirejo, pada saat itu sudah ada regulasi yang mengatur tentang pemilihan kepala desa. Mbah Admodimedjo adalah Lurah Sambirejo yang terpilih secara regulasi oleh masyarakat desa. Aturan tersebut mengatakan Lurah yang ada bisa menjabat seumur hidup. Sehingga beliau menjabat dimulai pada tahun 1945 sampai dengan masa pensiunnya pada tahun 1989. *Ketiga*, setelah memasuki era yang bisa dikatakan modern saat itu, tahun 1989 diadakan pemilihan dan yang terpilih menjadi Lurah pada saat itu adalah bapak Ngadiman Ba. Beliau menjabat sebagai Lurah selama dua periode yang dimana pada saat itu satu periode selama 8 tahun menjabat. *Keempat*, baru pada sekitar tahun 2007 atau 2008 bapak Sukardi terpilih menjadi lurah Sambirejo yang ke berikutnya dan menjabat sampai dengan sekitar tahun 2013 atau 2014. *Kelima*, pada tahun 2013 sampai dengan 2019, Kalurahan Sambirejo dipimpin oleh bapak Mujimin, dan. *Keenam*, pada tahun 2019, pemilihan kepala desa se-Sleman di undur dikarenakan pandemi Covid-19. Baru pada tahun 2020, Wahyu Nugroho, S.E terpilih menjadi lurah Sambirejo yang sekarang. Semua Lurah ini memiliki peranannya masing-masing dalam memajukan Kalurahan Sambirejo sampai saat ini.

Dahulunya, Kalurahan Sambirejo memiliki nama Groyokan lalu diganti nama menjadi Sambirejo dan diresmikan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX pada tahun 1946. Digantinya nama Groyokan menjadi Sambirejo ini karena dulunya di inspirasi oleh oleh dua pohon sambi yang sangat besar, subur, kokoh dan rindang. Kata *sambi* yang di inspirasi dari pohon sambi ini sebagai simbol kekuatan, sedangkan kata *rejo* yang berarti kemakmuran. Dengan harapan Kalurahan Sambirejo menjadi desa yang mampu mengayomi masyarakat, menjadi desa yang nyaman, subur dan sejuk sehingga mampu menciptakan kemakmuran bagi masyarakat.

## **B. Geografis**

Kalurahan Sambirejo merupakan salah satu Kalurahan di Kabupaten Sleman, yang terletak disebelah tenggara ibu kota Kapanewon Prambanan yang mempunyai luas 839.6375 Ha dan berada di Koordinat Bujur 110.5088 Koordinat Lintang -7.782435, 90% menempati pengunungan berbatu dengan tanah liat secara geografis ketinggian wilayah kurang lebih 300 – 425m dpl, dengan banyak banyak curah hujan 2000 – 3000 mm/th dan suhu udara rata-rata 23 – 32 celcius.

Dengan luas wilayah tersebut, Kalurahan Sambirejo ini memiliki 8 (Delapan) Pedukuhan yang terdiri dari Pedukuhan Sumberwatu, Dawangsari, Kikis, Gedang, Mlakan, Gunungcilik, Gunungsari dan Pedukuhan Nglengkong. Adapun batas-batas wilayah yaitu berbatasan langsung dengan :

Utara : Desa Pereng, Desa Sengon Kecamatan Prambanan Klaten

Selatan : Kalurahan Wukirharjo, Kalurahan Madurejo Kapanewon Prambanan Sleman

Barat : Kalurahan Madurejo, Kalurahan Bokoharjo Kapanewon Prambanan Sleman

Timur : Desa Katekan Gantiwarno Klaten, Kalurahan Gayamharjo Prambanan Sleman

### **C. Demografi**

Berdasarkan data profil desa tahun 2021, jumlah penduduk Kalurahan Sambirejo sebanyak 5.861 jiwa yang terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 2.892 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 2.969 jiwa. Sedangkan jumlah keluarga yang ada di Kalurahan Sambirejo terdiri dari 1.983 KK.

#### **a. Jumlah penduduk menurut kelompok umur**

Kependudukan merupakan salah satu hal penting untuk dijadikan perhatian yang serius, hal ini dikarenakan penduduk merupakan salah satu elemen yang dimiliki oleh suatu wilayah yang memiliki pemerintahan. Eksistensi suatu wilayah yang memiliki pemerintahan bisa diakui jika memiliki penduduk. Untuk itu perlu mengklasifikasikan penduduk berdasarkan umur salah satunya untuk melihat potensi Sumber Daya Manusia yang ada di Kalurahan Sambirejo.

**Tabel 2.1**  
**Jumlah Penduduk Menurut Umur**

No.	Umur	Jumlah (Orang)
1.	0 – 1 Tahun	50 Orang
2.	1 – 4 Tahun	400 Orang
3.	4 – 7 Tahun	235 Orang
4.	7 – 13 Tahun	547 Orang
5.	13 – 16 Tahun	259 Orang
6.	16 – 19 Tahun	237 Orang
7.	19 – 24 Tahun	386 Orang
8.	24 – 60 Tahun	2.260 Orang
9.	≥ 60 Tahun	1.487 Orang
10.	Jumlah	5.861 Orang

*Sumber : File Copy Profil Kalurahan Sambirejo 2021*

b. Jumlah penduduk menurut mata pencaharian

Mata pencaharian atau pekerjaan merupakan hal yang sangat penting bagi manusia, pekerjaan mempermudah manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Pekerjaan sangat mempengaruhi kehidupan seseorang baik dalam hal ekonomi, sosial dan lainnya. Untuk itu sebagai wilayah pemerintahan perlunya mengklasifikasikan penduduk berdasarkan mata pencaharian di Kalurahan Sambirejo untuk melihat potensi kesejahteraan masyarakat.

**Tabel 2.2**  
**Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian**

No.	Mata Pencaharian	Jumlah (Orang)
1.	Petani	1.275 Orang
2.	Buruh Tani	270 Orang
3.	Pegawai Negeri Sipil	50 Orang
4.	TNI	2 Orang
5.	Polri	2 Orang
6.	Penambang	75 Orang
7.	Tukang Kayu	150 Orang
8.	Karyawan Swasta	275 Orang
9.	Ibu Rumah Tangga	1.434 Orang
10.	Purnawirawan/Pensiunan	15 Orang
11.	Buruh Harian Lepas	1.350 Orang
12.	Satpam	11 Orang
13.	Wiraswasta	40 Orang
14.	Tidak mempunyai pekerjaan tetap	609 Orang

*Sumber : File Copy Profil Kalurahan Sambirejo 2021*

Dari tabel 2.2 di atas dapat diketahui bahwa mata pencaharian warga Kalurahan Sambirejo sangat beragam. Mata pencaharian yang paling banyak adalah buruh harian lepas dengan jumlah 1.350 Orang dan petani menjadi mata pencaharian terbanyak kedua yaitu sebanyak 1.275 orang.

c. Jumlah penduduk menurut tingkat Pendidikan

Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) terkadang ditentukan oleh pendidikan, tidak heran jika pendidikan umumnya dijadikan tolak ukur kualitas setiap orang. Dalam kehidupan bermasyarakat

pendidikan sangat dibutuhkan karena pendidikan merupakan suatu proses pembelajaran demi meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam hal berpikir dalam menentukan tindakan seseorang dalam kehidupan bermasyarakat. Untuk melihat potensi Sumber Daya Manusia yang ada di Kalurahan Sambirejo perlunya mengklasifikasi penduduk berdasarkan tingkat pendidikan.

**Tabel 2.3**  
**Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan**

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	Usia 3-6 Tahun yang belum masuk TK	313
2.	Usia 7-18 Tahun yang sedang Sekolah	993
3.	Tamat SD/Sederajat	1295
4.	Tamat SLTP/Sederajat	905
5.	Tamat SLTA/Sederajat	1210
6.	Tamat D2/Sederajat	5
7.	Tamat D3/Sederajat	19
8.	Tamat S1/Sederajat	55
9.	Tamat S2/Sederajat	2

*Sumber : File Copy Profil Kalurahan Sambirejo 2021*

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa, masyarakat Kalurahan Sambirejo adalah penduduk dengan tingkat pendidikan SD/Sederajat lebih tinggi sekitar 1295 orang dan diposisi kedua masyarakat dengan tingkat pendidikan SLTA/Sederajat dengan jumlah sekitar 1210 orang dan penduduk dengan tingkat pendidikan tamat S2/Sederajat adalah yang terendah yaitu sekitar 2

orang. Jika dilihat dari tingkat penduduk, maka penduduk Kalurahan Sambirejo memiliki tingkat pendidikan yang cukup baik, paling tidak sudah pernah menempuh bangku pendidikan.

d. Jumlah penduduk menurut pemeluk agama

keberagaman tidak bisa terlepas dari kehidupan kita sebagai warga negara Indonesia, baik dalam kehidupan bernegara maupun dalam berdesa. Keberagaman membuat kehidupan lebih indah dan harmonis, terkhususnya kehidupan beragama. Untuk itu Pemerintah Kalurahan Sambirejo harus mengklasifikasikan jumlah penduduk berdasarkan pemeluk agama di Kalurahan Sambirejo.

**Tabel 2.4**  
**Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama**

No.	Agama	Jumlah
1.	Islam	5798
2.	Kristen	13
3.	Khatolik	59
4.	Hindu	5
5.	Budha	0
6.	Khonghucu	0

*Sumber : File Copy Profil Kalurahan Sambirejo 2021*

Dari Tabel 2.4 tersebut, penduduk Kalurahan Sambirejo memeluk agama yang beragam yaitu Islam, Kristen, Khatolik dan Hindu. Mereka hidup berdampingan dan melahirkan toleransi yang indah.



Mayoritas penduduk Kalurahan Sambirejo adalah beragama Islam dengan jumlah 5798 orang.

#### **D. Sarana dan Prasarana**

Sarana dan prasarana merupakan salah satu hal yang dijadikan perhatian serius karena memberikan peranan penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu sarana dan prasarana Kalurahan merupakan salah satu gambaran tentang bagaimana implementasi fungsi pemerintah yaitu *protection* dan *distributing*. Sarana dan prasarana juga merupakan suatu tolak ukur yang digunakan untuk menilai kinerja dan efektifitas pembangunan yang dilakukan di suatu daerah oleh pemerintah setempat. Untuk itu sarana dan prasarana harus dikembangkan dan ditingkatkan kualitasnya demi sebuah keberhasilan dan kemajuan desa. Kalurahan Sambirejo memiliki beberapa sarana dan prasarana dalam menunjang kesejahteraan kehidupan di desa. Untuk itu penulis akan meng gambarkannya dalam bentuk tabel berikut ini.

##### a. Prasarana Pendidikan

**Tabel 2.5**  
**Prasarana Pendidikan**

<b>A. No.</b>	<b>Jenis Prasarana Pendidikan</b>	<b>Jumlah</b>
1.	Gedung SMP/Sederajat	1 buah
2.	Gedung SD/Sederajat	2 buah
3.	Gedung TK	1 buah
4.	Perpustakaan Desa/Kelurahan	1 buah

*Sumber : Daftar Isian Potensi Desa dan Kalurahan Sambirejo*

Dari tabel 2.5 diatas dapat diketahui bahwa fasilitas pendidikan di Kalurahan Sambirejo sudah cukup memadai, terlihat dengan adanya gedung SMP 1 Buah, SD 2 buah, TK 1 buah. Serta terdapat 1 Perpustakaan Kalurahan dalam menunjang pembelajaran.

b. Prasarana Ibadah

**Tabel 2.6**  
**Prasarana Ibadah**

No.	Jenis Prasarana Peribadatan	Jumlah
1.	Majid	12 buah
2.	Mushola	6 buah
3.	Pura	1 buah

*Sumber : Daftar Isian Potensi Desa dan Kalurahan Sambirejo*

Dari tabel 2.6 diatas dapat diketahui bahwa fasilitas prasarana peribadatan di Kalurahan Sambirejo cukup memadai. Masjid dan Mushola menjadi fasilitas peribadatan yang paling banyak, hal ini dikarenakan mayoritas penduduk Kalurahan Sambirejo adalah pemeluk agama islam.

c. Prasarana Kesehatan

**Tabel 2.7**  
**Prasarana Kesehatan**

No.	Prasarana Kesehatan	Jumlah
1.	Puskesmas Pembantu	1 unit
2.	Posyandu	10 unit

*Sumber : Daftar Isian Potensi Desa dan Kalurahan Sambirejo*

Fasilitas kesehatan di Kalurahan Sambirejo terlihat sudah cukup memadai. Dari tabel diatas dapat diketahui Kalurahan Sambirejo

memiliki 1 unit Puskesmas Pembantu dan terdapat 10 unit Posyandu. Tersedianya fasilitas kesehatan yang memadai ini tentunya dapat memudahkan masyarakat Kalurahan Sambirejo untuk mengakses fasilitas kesehatan dan memberikan dampak yang baik bagi kesehatan masyarakat Kalurahan Sambirejo.

d. Prasarana Umum

**Tabel 2.8**  
**Prasarana Umum**

No.	Prasarana Umum	Jumlah
1.	Olahraga	13
2.	Pariwisata	7
3.	Sumur	50
4.	MCK Umum	5
5.	Embung	1
6.	Diesel Umum	6

*Sumber: Data Profil Desa Tahun 2021*

**E. Keadaan Sosial, Ekonomi dan Budaya**

Dilihat dari data profil Kelurahan tahun 2021, mayoritas mata pencaharian pokok penduduk Kalurahan Sambirejo adalah menjadi buruh harian lepas. Petani menjadi pekerjaan kedua yang banyak di Kalurahan Sambirejo. Dalam hal ini permasalahan yang sering muncul berkaitan dengan mata pencaharian penduduk adalah terbatasnya lapangan pekerjaan yang sesuai dengan tingkat perkembangan penduduk.

Kalurahan Sambirejo memiliki beberapa kelembagaan sosial dengan berbagai macam kegiatan, hal ini merupakan salah satu aset kalurahan yang bermanfaat untuk dijadikan media penyampaian informasi dalam setiap

pembangunan kalurahan kepada masyarakat. Berbagai organisasi sosial tersebut diantaranya adalah LPMD, PKK, Karang Taruna, dan Kelompok Tani.

Pada sektor seni dan budaya, hampir setiap dukuh memiliki ragam yang berbeda, mulai dari Merti desa, Dekahan, Kenduran, Mitoni, Wiwitan, Ndaweti, Brokohan, Tingkeban, Tendak Sinten, Jathilan, Seni Tari, Ketophrak, dan Hadrah.

#### **F. Potensi Desa Wisata**

Desa Wisata Sambirejo adalah salah satu dari desa wisata yang berkembang di wilayah Yogyakarta. Desa Sambirejo terletak di Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, DIY. Dilihat dari luas wilayahnya, Sambirejo memiliki luas sekitar 8.396.375 hektare dengan lanscape dominan perbukitan. Ada sekitar 1900 KK dan 5861 jiwa yang terdiri dari 8 dusun. Secara spesifik, Desa Sambirejo berada di ketinggian 350 mdpl. Berjarak sekitar 17 km dari Kota Jogja. Tema yang disajikan di Desa Wisata Sambirejo berupa wisata budaya untuk mengenal seni dan budaya, outbound, agro, membathik, wisata kuliner, menjelajah wisata, menikmati matahari terbit dan terbenam, oleh-oleh khas, wisata, edukasi dengan mengunjungi geoheritage serta belajar sejarah dan arkeologi.

Sambirejo disahkan secara resmi sebagai Desa Wisata sejak 28 Mei Tahun 2018 berdasarkan surat keputusan Bupati Sleman, yang pada saat itu dijabat oleh Sri Purnomo. Sebelum menjadi Desa Wisata tingkat ekonomi dan pendapatan masyarakat Sambirejo sangat rendah. Hal tersebut dikarenakan kondisi geografis desa cukup terpencil dan cukup jauh dari Perkotaan dan

kondisi lahan yang kurang subur dikarenakan kurangnya sumber air di perbukitan. Sehingga banyak warga Sambirejo memiliki mata pencaharian menambang batu dan membuat bahan bangunan dari batu-batuan.

Sejak tahun 1980-an. Dari situ pula, menambang jadi pekerjaan turun-temurun dan masyarakat tidak pernah terpikir untuk menggali nilai ekonomi tebing dengan sisi lain. Akan tetapi pada 2014, Pemerintah Provinsi DIY menyosialisasikan pelarangan penambangan Tebing Breksi. Pelarangan penambangan Tebing Breksi muncul setelah Oktober 2014 Gubernur DIY menerima Surat Keputusan Kepala Badan Geologi Kementerian Energi Sumber Daya Mineral tentang Penentuan 9 Kawasan Cagar Alam Geologi DIY per 2 Oktober 2014. Kala itu penambang bingung, mau bekerja sebagai apa kalau tidak lagi menjadi penambang. Sehingga mau tidak mau mereka harus melakukan reposisi yang tadinya penambang batu menjadi Pengelola Wisata. Sebelumnya bekerja menggunakan baju dan pakaian seadanya bahkan tidak menggunakan alas kaki harus berubah menggunakan seragam, sepatu, sopan dan wajib berpakaian rapi.

Setelah penutupan aktivitas tambang tersebut, masyarakat juga mendekorasi lokasi bekas pertambangan ini menjadi tempat wisata yang layak untuk dikunjungi. Tepatnya pada 30 Mei 2015, Tebing Breksi ini diresmikan oleh Sri Sultan Hamengku Buwono X sebagai tempat wisata baru di Jogja. Mulai saat itu wisata Taman Tebing Breksi menjadi titik awal adanya Wisata di Desa Sambirejo yang di kelola langsung oleh masyarakat Desa Sambirejo. Dengan meningkatnya kunjungan, Tebing Breksi dapat membuka lapangan

pekerjaan. Semakin banyak masyarakat Desa Sambirejo bergantung mencari sumber Ekonomi di Tebing Breksi untuk menjadi Pengelola Wisata, Pekerja Kuliner, Juru Foto, dan Jeep Wisata.

Wisata Taman Tebing Breksi dapat memotivasi atau mendorong warga sekitar untuk menjadikan Desa Sambirejo menjadi Desa Wisata. Selain itu, masih ada banyak lagi potensi wisata yang ada di Desa Sambirejo baik yang di kelola Pemda (Pemerintah Daerah) ataupun milik pribadi. Wisata-wisata tersebut meliputi Candi Ijo, Candi Barong, Watu Payung, Batu Papal, Embung Pandanrejo, Embung Sumberwatu, Arca Gupolo, Bukit Srumbung, dsb. Walaupun begitu kami masih berfokus di Obyek Daya Tarik Wisata Tebing Breksi sebagai maket dan point center. Walaupun kami sadar banyak lagi potensi yang ada di Desa.

Latar belakang terbentuknya Desa Wisata Sambirejo adalah dengan adanya daya Tarik dan potensi wisata yang ada di Desa Sambirejo. Wisata Taman Tebing Breksi menjadi titik awal adanya Wisata di Desa Sambirejo yang di kelola langsung oleh masyarakat Desa Sambirejo. Wisata Taman Tebing Breksi juga memotivasi atau mendorong warga sekitar untuk menjadikan Desa Sambirejo menjadi Desa Wisata. Selain itu, masih ada banyak lagi potensi wisata yang ada di Desa Sambirejo baik yang di kelola Pemda (Pemerintah Daerah) ataupun milik pribadi. Wisata-wisata tersebut meliputi : Tebing Breksi, Candi Ijo, Candi Barong, Watu Payung, Batu Papal, Embung Pandanrejo, Embung Sumberwatu, Arca Gupolo, dsb.

## G. Prestasi Kalurahan Sambirejo

Sebagai salah satu desa wisata yang terbilang maju, Kalurahan Sambirejo sudah banyak memperoleh prestasi dan penghargaan diantaranya:

**Tabel 2.9**  
**Prestasi-Prestasi Kalurahan**

No	Prestasi-Prestasi Kalurahan Sambirejo
1.	Juara 1 Pokdarwis tingkat DIY pada Tahun 2019
2.	Piagam Penghargaan untuk Sistem Manajemen Pengamanan Objek Vital Nasional dan Objek Tertentu
3.	Juara 1 Anugerah Pesona Indonesia (API), menjadi Tujuan Wisata Baru Terpopuler pada Tahun 2017
4.	Pemenang Desa Wisata di Desa Sambirejo pada Tahun 2019
5.	Juara 1 Sapta Pesona, sebagai Destinasi yang Tertib dan Bersih selama Adaptasi Kebiasaan Baru
6.	Juara 2 Lomba Pokdarwis Tingkat DIY pada Tahun 2018 dan mendapat sertifikat dari Dinas Pariwisata DIY
7.	Peringkat 2 Pokdarwis kategori mandiri
8.	Mendapat Sertifikat CHSE pada Tahun 2020
9.	Masuk 10 Besar Bumdes Nasional (Bumdes Sambimulyo)
10.	Masuk 50 besar sebagai Desa Wisata Terbaik Tahun 2022
11.	Masuk 5 Besar Kategori DesaWisata Terbaik Tahun 2022
12.	Juara 1 Evaluasi Pembangunan Desa/Kalurahan se Kabupaten Sleman

Sumber: [https://jadesta.kemenparekraf.go.id/desa/dewi\\_sambi](https://jadesta.kemenparekraf.go.id/desa/dewi_sambi)

Prestasi yang diperoleh Kalurahan Sambirejo ini adalah sebagai buah dari kerja keras Pemerintah Kalurahan dan masyarakat desa yang diperuntukkan tidak hanya untuk yang berprestasi, bukan pula hanya untuk negara, tetapi untuk seluruh masyarakat Kalurahan Sambirejo. Prestasi-

prestasi ini, mengantarkan Kalurahan Sambirejo memperoleh banyak apresiasi. Sehingga, prestasi-prestasi ini tidak hanya menjadi sekedar pajangan untuk dipublikasikan, namun ada nilai yang membangkitkan semangat mewujudkan mimpi.

#### **H. Pemerintah Kalurahan Sambirejo**

Pemerintahan Kalurahan Sambirejo terdiri dari Lurah dan dibantu oleh perangkat Kalurahan dengan total berjumlah 24 orang. Terdiri dari: Lurah, Carik, Urusan tata usaha dan umum (Kaur Tata Laksana), Urusan Tata Keuangan (Kaur Danarta), Urusan Tata Perencanaan (Kaur Pangripta), Seksi Pemerintahan (Jagabaya), Seksi Kesejahteraan (Ulu-Ulu), Seksi Pelayanan (Kamituwa) dan Padukuhan (Dukuh). Di Kalurahan Sambirejo memiliki 8 Padukuhan dan 45 RT.

**Tabel 2.10**

**Tabel Daftar Perangkat Kalurahan**

<b>No.</b>	<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>
1.	Wahyu Nugroho, S.E	Lurah
2.	Mujimin, S.Sos	Carik
3.	Muryanto	Kepala Urusan Danarta
4.	Rantini	Kepala Urusan Pangripta
5.	Tarini	Kepala Urusan Tata Laksana
6.	Tukiman	Jagabaya
7.	Supandi	Kamituwa
8.	Nur Cahyanto	Ulu-Ulu
9.	Ari Puspitasari, S.Ak	Staff Danarta
10.	Ardiyansah Riyan P	Staff Pangripta
11.	Sriyanto	Staff Kamituwa
12.	Rudi Santosa, S.E	Staff Ulu-ulu
13.	Dwi Hartono	Staff Jagabaya

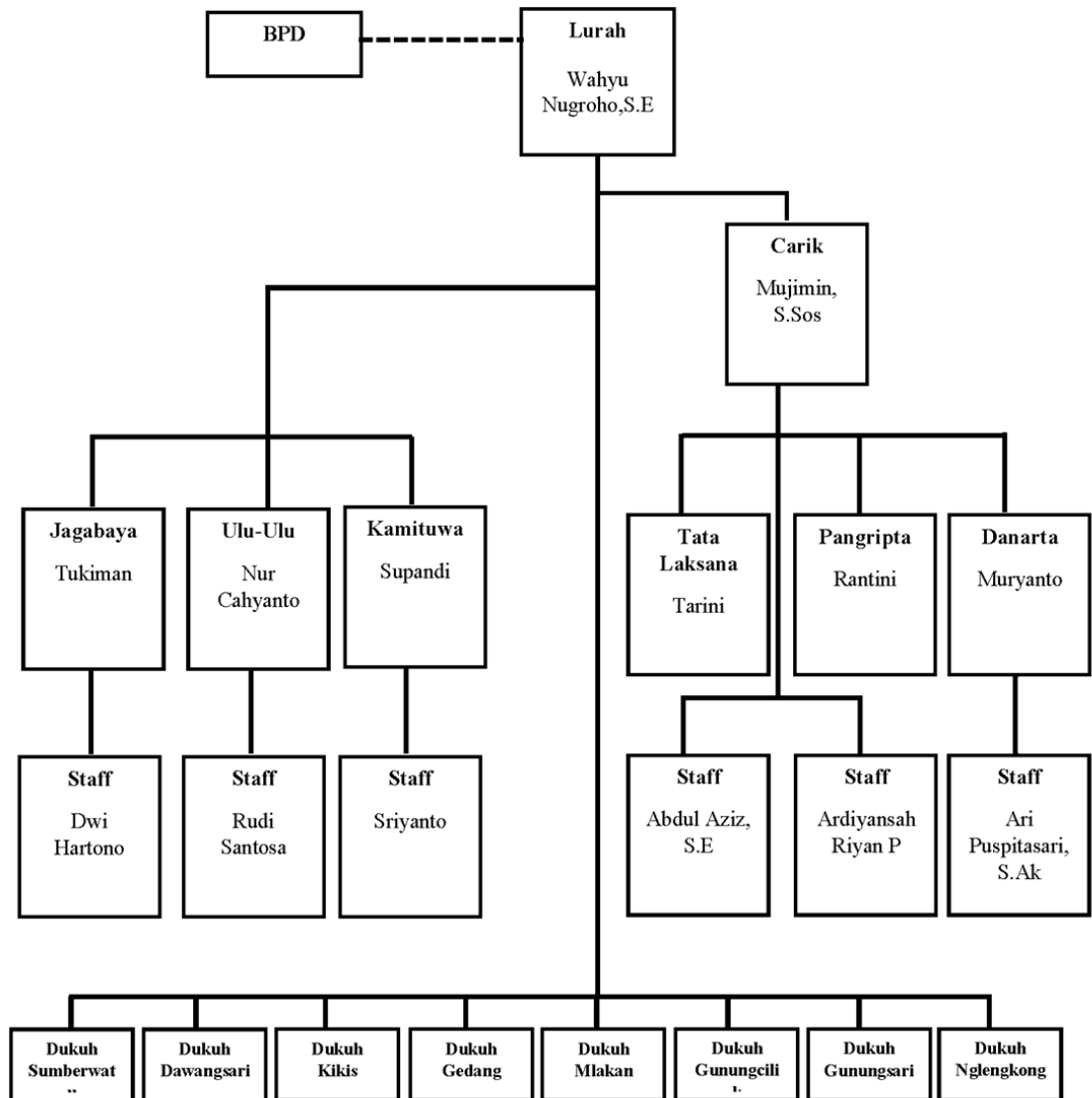


<b>No.</b>	<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>
14.	Abdul Azis, S.E	Staff Kesekretariatan (Arsip & Inventaris)
15.	Sigit Prasetyo	Staff Kesekretariatan (Teknologi Informasi)
16.	Restu Hayyu Khoirunnisa, S.Pd	Staff Kesekretariatan (Teknologi Informasi)
17.	Teguh Widodo	Dukuh Sumberwatu
18.	Jumiran	Dukuh Dawangsari
19.	Bagiyo	Dukuh Kikis
20.	Sukisno	Dukuh Gedang
21.	Jaini	Dukuh Mlakan
22.	Pardiyono	Dukuh Gunungcilik
23.	Maryono	Dukuh Gunungsari
24.	Ahmadi	Dukuh Nglengkong

Sumber: <https://desasambirejo.smartvillagenusantara.id/>

Tabel 2.11

Struktur Pemerintahan Kalurahan Sambirejo



Peraturan Kalurahan Sambirejo Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Sambirejo

- **PERUBAHAN NOMENKLATUR**

Peraturan Kalurahan Sambirejo Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Sambirejo

**Tabel 2.12**  
**Perubahan Nomenklatur**  
**Menurut UU No 13/2012 Tentang Keistimewaan DIY**

<b>Nomenklatur Jabatan Lama</b>	<b>Nomenklatur Jabatan Baru</b>
Kepala Desa	Lurah
Sekretaris Desa	Carik
Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum	Kepala Urusan Tata Laksana
Kepala Urusan Keuangan	Kepala Urusan Danarta
Kepala Perencanaan	Kepala Urusan Pangripta
Kepala Seksi Pemerintahan	Jagabaya
Kepala Seksi Kesejahteraan	Ulu-Ulu
Kepala Seksi Pelayanan	Kamituwa
Dukuh	Dukuh

Sumber : <https://desasambirejo.smartvillagenusantara.id/>

## **I. Visi Misi Kalurahan Sambirejo**

Dalam menjalankan pemerintahan desa, Wahyu Nugroho, S.E selaku Lurah Kalurahan Sambirejo memiliki Visi dan Misi sebagai sebuah tujuan atau upaya dalam membangun dan memajukan Kalurahan Sambirejo. Adapun Visi dan Misi Kalurahan Sambirejo adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.13**  
**Visi dan Misi**

<b>Visi</b>	<b>Misi</b>
<p>Terwujudnya Good Governance Pada Pemerintahan Kalurahan Sambirejo Dalam Rangka Optimalisasi Potensi dan Pemerataan Pembangunan Kalurahan.</p>	<p>Menyelenggarakan Pemerintahan dengan Prinsip-Prinsip Good Governance yang:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Akuntabilitas</li> <li>2. Pengawasan</li> <li>3. Daya Tangkap</li> <li>4. Profesionalisme</li> <li>5. Efisiensi dan Efektivitas</li> <li>6. Wawasan ke Depan</li> <li>7. Partisipasi</li> <li>8. Penegakan Hukum</li> </ol> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan Potensi Pemuda Sambirejo dengan kegiatan kepemudaan dan fasilitas olahraga yang memadai</li> <li>• Pelatihan Softskill dan Hardskill untuk Optimalisasi Potensi Pemuda</li> <li>• Mengembangkan Perekonomian Masyarakat Melalui Pemanfaatan Potensi Padukuhan</li> <li>• Percepatan Layanan Masyarakat dengan Implementasi Teknologi</li> </ul>

Sumber: <https://desasambirejo.smartvillagenusantara.id/>

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Konsep pembangunan merupakan terjemahan dari apa yang dikenal dengan *developmentalism* yang memiliki makna yang sama dengan modernitas (*modernity*). Dalam praktiknya, modernisasi ini sering kali atau cenderung tidak menghargai, melupakan bahkan membuang atau memusuhi tradisionalisme dan kearifan lokal. Pembangunanisme menjadi sebuah *style of governance* yang menitikberatkan pada produktivitas ekonomi dan memerlukan upaya sungguh-sungguh untuk penyempitan ruang sosial dan meminimalkan hal-hal yang menimbulkan konflik sosial atau resistensi. Untuk mencapai hal ini diperlukan aparatur negara dengan desain kelembagaan yang dapat menjamin terciptanya mekanisme yang mampu meminimalisasi konflik bahkan meniadakan dengan mengutamakan ketertiban. Dalam hal ini sama seperti yang dikatakan Foucault yaitu melalui normalisasi. Normalisasi memiliki kaitan dengan kekuasaan. Normalisasi adalah salah satu cara untuk mendisiplinkan tubuh subjek. Normalisasi dalam program *SDGs* Desa ini dihadirkan melalui pengaturan-pengaturan sehingga menekan adanya resistensi. Normalisasi juga hadir melalui 18 tujuan-tujuan atau indikator program *SDGs* Desa yang dianggap menjadi sebuah kebenaran.

Kehadiran konsep pembangunan tidak lahir begitu saja, tetapi ia lahir melalui sebuah proses politik yang melibatkan aktor-aktor kepentingan dan

beberapa stakeholder lainnya. Konsep pembangunan ini lahir dari gabungan ide, gagasan dan pemikiran para ahli-ahli tersebut. Kehadirannya merupakan hasil proses politik yang memiliki kepentingan yang berkoalisi dengan kekuatan-kekuatan ekonomi politik. Artinya ia lahir sesungguhnya merupakan satu diskursus pemikiran yang sengaja diciptakan untuk kepentingan para teknokrat.

Pembangunan menjadi sebuah ciri khas teknokrasi, yang memukul atau menjawab semua permasalahan dengan pembangunan. Kehadiran program pembangunan *SDGs* Desa yang dibawa oleh para teknokrat ini menjadi substansi utama pembangunan dengan menghadirkan 18 tujuan yang dianggap mulia dengan semboyan *no one left behind* (tidak ada satupun tertinggal di belakang). Kehadiran program ini menjadi kontradiksi yang menjadikan desa sebagai lokus dari pembangunan yang mengubah posisi desa sebagai subjek dari pembangunan menjadi objek pembangunan sebagai, penerima, klien, atau bahkan partisipasi pembangunan. Kenyataan seperti ini tentang program pembangunan memberikan peneliti satu kesimpulan bahwa pembangunan sangat erat kaitannya dengan proses dan kepentingan para teknokrat itu sendiri.

Dalam Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014, asas rekognisi dan asas subsidiaritas menjadi asas penting bagi desa, karena kedua asas ini menjadi proteksi bagi desa. asas subsidiaritas mengajarkan prinsip “bukan campur tangan, melainkan memberi uluran tangan”. Tindakan campur tangan ini tidak dibenarkan oleh asas rekognisi dan subsidiaritas dalam Undang-

Undang Desa. Dengan kedua kerangka tersebut, kehadirannya memberikan makna kemandirian bagi desa yang mempunyai kewenangan, perencanaan, penganggaran sendiri dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Serta menjadikan desa tidak semata menjadi penerima manfaat program-program pemerintah, melainkan mempunyai kapasitas pemberi manfaat bagi masyarakat. Pengertian desa dalam UU Desa merupakan sebuah entitas yang mempunyai salah satu fungsi atau kewenangan dalam pembangunan. Sehingga pembangunan desa menjadi tanggung jawab desa itu sendiri sesuai dengan konteks lokal desa. Ia mempunyai nalar sendiri dalam membangun desa tanpa adanya intervensi.

Diinternalisasikannya program *SDGs* Desa ini ke dalam tubuh desa oleh para teknokrat ini mereduksi desa menjadi lokus dari pembangunan, sehingga kehadiran program ini menjadikan desa sibuk dengan urusan-urusan administrasi, perencanaan, pendataan dan lainnya. Kehadiran aplikasi *SDGs* juga membuat repot desa dengan kondisi aplikasi yang sering mengalami gangguan kendala eror. Untuk mengupayakan pencapaian *SDGs* Desa, Pemerintah mereduksi dana desa menjadi proyek dana desa untuk membiayai kegiatan-kegiatan *SDGs* Desa. Dana desa yang merupakan bentuk dari asas subsidiaritas ini seharusnya memberikan ruang inovasi bagi desa dalam memajukan desa nyatanya tidak terlaksanakan. Dana desa diatur penggunaannya untuk pencapaian *SDGs* ini, sehingga di Kalurahan Sambirejo, beberapa program dari jabaran visi misi Lurah tidak terlaksanakan melalui dana desa itu sendiri. Persenan dana desa diatur dari atas melalui peraturan-

peraturan yang masuk ke desa, sehingga hal tersebut membelenggu desa, desa terpaksa mengikuti semua kemauan pusat.

Kehadiran program pembangunan *SDGs* Desa yang dipaksakan ke desa ini membentuk pemerintahan desa. Kehadirannya menggeser hakikat pemerintahan sebagai pemberi pelayanan dan proteksi kepada masyarakat desa menjadi pemerintahan yang bercorak pembangunan (*developmental government*). Pemerintahan *developmental* (*developmental government*) ini memiliki karakteristik sebagai berikut; *Pertama*, cara berpikir, bertindak dan segalanya oleh pemerintah itu semuanya ditentukan oleh pembangunan. *Kedua*, pemerintah lebih banyak mengurus pembangunan, pekerja proyek ketimbang mengedepankan fungsi utamanya sebagai proteksi dan distribusi kepada masyarakat desa. *Ketiga*, pemerintah menjadi pelaku utama pembangunan.

Pergeseran fungsi pemerintah oleh program pembangunan *SDGs* ini dapat memberikan dampak negatif bagi keberlangsungan kehidupan berdesa. Melayani (*distributing*) dan memberikan perlindungan (*protecting*) kepada masyarakat sudah menjadi tugas utama Pemerintah. Apabila hal ini tergeserkan menjadi pemerintahan yang *developmental*, yang terjadi adalah relasi antara pemerintah desa dan masyarakat tidak terjalin dengan baik; menciptakan ketergantungan masyarakat terhadap bantuan-bantuan dari pemerintah; desa menjadi tidak mandiri yang hanya sebagai pekerja proyek, serta desa tidak bisa berkembang menjadi desa yang kuat. Serta hal ini akan



membawa kembali desa seperti masa lalunya, yang banyak mengurus administrasi dan arahan dari atas ketimbang mengurus desa.

## **B. Meneguhkan Kembali Desa sebagai Subjek Pembangunan**

Dalam UU Desa Nomor 6 Tahun 2014, telah menegaskan posisi desa sebagai sebuah entitas yang memiliki kewenangan sesuai dengan prakarsa lokal. Dalam artian desa memiliki kewenangan dalam pembangunan salah satunya. Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum atau badan hukum publik juga memiliki kewenangan meskipun tidak seluas kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Kewenangan desa adalah hak desa untuk mengatur, mengurus dan bertanggung jawab atas urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Kewenangan desa dalam pembangunan adalah bagaimana desa bertanggung jawab merencanakan, menganggarkan dan menjalankan kegiatan pembangunan yang ada di desa bersama dengan pemerintah desa dan masyarakat desa.

Kehadiran UU Desa ini memberikan kepercayaan kepada desa untuk bisa membangun atau mengurus segala kepentingannya sesuai dengan konteks lokal. Dengan kehadirannya, UU Desa memosisikan desa sebagai subjek dalam pembangunan bukan sebagai objek pembangunan yang hanya sebagai tempat membuang bantuan-bantuan dari pemerintah. Pembangunan merupakan hak milik desa, bukan milik teknokrat yang ditempelkan ke desa. Kehadiran program *SDGs* Desa ini merupakan sebuah kesalahan besar yang dibawa oleh para teknokrat yang bekerja sama dengan lembaga-lembaga internasional.

UU Desa hadir mengubah cara pandang desa yang dulu hanya dijadikan sebagai arena atau lokasi penyelenggaraan proyek dari atas menjadi arena bagi orang desa untuk menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan dan kemasyarakatan. Artinya ia hadir memberikan kepercayaan kepada desa, bahwa desa mempunyai kapasitas atau kemampuan dalam menyelenggarakan pemerintahannya termasuk menyelenggarakan pembangunan dalam menjawab masalah yang ada di desa. dengan kehadiran dua asas utama rekognisi-subsidiaritas, desa diposisikan sebagai subjek dalam pembangunan. UU Desa hadir bukan hanya sebagai legalitas bentuk pengakuan terhadap desa, tetapi ia hadir memberikan ruang inovasi bagi desa dalam memajukan desanya sesuai dengan kondisi desa yang ada. Dengan begitu, desa dapat berkembang dalam berbagai bentuk. Desa perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis, sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam pemerintahan dan pembangunan yang makmur dan sejahtera.

Untuk dapat meneguhkan kembali posisi desa sebagai subjek dalam pembangunan, pemerintah harus bisa melihat desa sebagai sebuah entitas bukan sebagai sesuatu yang direduksi yang hanya dijadikan sebagai locus pembangunan yang memposisikan masyarakat desa sebagai objek yang ditarget dan sebagai pekerja proyek. Pemerintah harus bisa memahami bahwa pembangunan sebagaimana yang telah dijelaskan dalam UU Desa adalah sesuatu yang menjadi milik desa. Melalui dana desa, desa berhak mengalokasikan dana desa untuk apa saja dalam menjawab masalah yang ada

di desa, termasuk masalah pembangunan oleh desa itu sendiri tanpa adanya intervensi dari luar. Sebagai unsur terkecil dari negara, desa yang dekat dengan kehidupan masyarakat harus dilindungi, bukan dibelenggu oleh segala jenis aturan yang pada prakteknya pemerintah desa tidak bisa bergerak bebas karena banyaknya aturan yang mengikat. Pemerintah tidak perlu mengurus dan mengatur terlalu jauh desa, melainkan membina dan memfasilitasi desa sehingga membentuk desa yang mandiri, makmur dan sejahtera.

## DAFTAR PUSTAKA

### Sumber Buku dan Jurnal:

- Dumadi Tri Restiyanto, & Nanang Yusroni. (2006). Kegagalan Pembangunan Ekonomi Indonesia Akibat Terperangkap Kegagalan Pendekatan Teori Ekonomi Pembangunan. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 1(2), 175–185.
- Eko, S. (2017) *Desa Baru Negara Lama*. Yogyakarta: Pasca Sarjana-Stpmd —Apmdl
- Eko, S., & Krisdayatmiko. (2006). *Kaya Proyek Miskin Kebijakan Membongkar Kegagalan Pembangunan Desa* (Cet. 1, Vol. 1). 2006.
- Iskandar, A. H. (2020). *Sdgs Desa Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional Berkelanjutan* (Suja'ie Ach. Faidy & Agusta Ivanovich, Eds.; 1st Ed., Vol. 1). Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Li, T. M. (N.D.). *Revisiting The Will To Improve*.
- Li, T. M. (2012). *The Will To Improve: Perencanaan, Kekuasaan, Dan Pembangunan* (Cet, 4).
- Mashito Beby. (2013). *Dinamika Politik Pembangunan Pada Masa Orde Baru (Studi Tentang Industrialisasi Ketergantungan Dan Peran Modal Jepang)*. 6(2), 118–122.
- Masruroh, Y., & Zuber, A. (2014). *Kemiskinan Dalam Pembangunan* (Vol. 3, Issue 1).
- Novianti, K. (2016). Kota Berkelanjutan: Antara Ide Dan Implementasi Dalam Perspektif Pemangku Kepentingan. *Jurnal Patrawidya*, 17(3).
- Sulistiowati, R., Pengajar, S., & Administrasi, J. (N.D.). *Teori Pembangunan Dunia Ketiga Dan Pengaruhnya Terhadap Pembangunan Nasional*.
- Yunindyawati. (2014). Marjinalisasi Pedesaan Akibat Relasi Kuasa Lokal Dan Supralokal. *Sosiologi Reflektif*, 9(1), 83–95.
- Muslim, A. (2017). Analisis Kegagalan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Dalam Membangun Kemandirian Masyarakat Miskin (Studi Kasus Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, Dan Jawa Timur). *Jurnal Penyuluhan*, 13(1), 79-87.

- Kharisma, A. H. (2018). Menuju Pembangunan Global Yang Demokratis: Kritik Wangari Maathai Terhadap Wacana Pembangunan Global. *Indonesian Journal Of International Relations*, 1(2), 70-89
- Hadi, A. P. (2009). Tinjauan Terhadap Berbagai Program Pemberdayaan Masyarakat Di Indonesia. *Yayasan Agribisnis/Pusat Pengembangan Masyarakat Agrikarya (Ppma)*.
- Huraerah, A. (2013). Strategi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 12(1), 3-13.
- Bahasoan Aminah, & Kotarumalos Faisal Amir. (2014). *Praktek Relasi Wacana Dan Kuasa Foucaultian Dalam Realias Multi Profesi Di Indonesia*. 8, 13–21.
- Eko, S. (2021). Government Making: Rebuilding Government Science. *Governabilitas (Jurnal Ilmu Pemerintahan Semesta)*, 2(1), 1–20. <https://doi.org/10.47431/Governabilitas.V2i1.109>
- Fadilah Fadilah, I., & Dan Pembangunan Sosial Penulis Efri Syamsul Bahri Efri Syamsul Bahri, Z. (N.D.). *Strategi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Di Indonesia Policy Strategy Of Tackling Poverty In Indonesia Related Papers*.
- Murdiyana, O. :, & Mulyana, D. (2017). *Analisis Kebijakan Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia* (Vol. 10, Issue 1). [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id),
- Sulistiowati, R., Pengajar, S., & Administrasi, J. (N.D.). *Teori Pembangunan Dunia Ketiga Dan Pengaruhnya Terhadap Pembangunan Nasional*.
- Napitupulu, M. D., Pasaribu, V. A. R., & Sihombing, N. (N.D.). *Analisis Implementasi Sustainable Development Goals (Sdgs) Desa Bakal Gajah Melalui Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)*.
- Putu Rai Sukmaning Wahyu, I., Ketut Putra Erawan, I., & Agung Sagung Mirah Mahaswari Jayanthi Mertha, A. (N.D.). *Praktik Governmentality Dan Nativisme Dalam Kebijakan Keluarga Berencana Krama Bali*.
- Hompage, J., Bhayu Pratama, N., & Priyo Purnomo, E. (N.D.). Sosiohumaniora: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Dan Humaniora Sustainable Development Goals (Sdgs) Dan Pengentasan Kemiskinan Di Daerah Istimewa Yogyakarta. In 64 / *Sosiohumaniora* (Vol. 6, Issue 2).
- Mosco, V. (N.D.). *Apa Itu Ekonomi Politik Apa Itu Ekonomi-Politik Komunikasi? Definisi & Karakteristik*.

Sahdan Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa, G. (2020). *Membongkar Selubung Ideologi Ilmu Pemerintahan : Perspektif Governmentality* (Vol. 1).

Pratiwi, A. (2021). *Kebijakan Ekonomi: Perspektif Ekonomi Politik Dalam Pembangunan Di Indonesia* (Vol. 3, Issue 1). [Http://Ojs.Stiami.Ac.Id](http://Ojs.Stiami.Ac.Id)

Pemerintahan Soekarwo, K., & Oktavia Trianahadi, H. (2014). *Governmentality Dalam Program Jalin Matra : Studi Kebijakan Pengentasan*.

Setiyaningsih, D. (2021). *Rezim Pembangunan Internasional: Dari Diskursus Hegemonik Hingga Kepengaturan Politik* (Vol. 3, Issue 1).

Pengentasan Kemiskinan, D., Ishartono, O. :, Santoso, &, & Raharjo, T. (N.D.). *Sustainable Development Goals (Sdgs)*.  
<http://www.bappenas.go.id/id/berita-dan-siaran->

#### **Sumber Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah:**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022

#### **Sumber Data Lainnya:**

Eko. 2021, 27 November. Salah Kaprah : Pembangunan Menjadi Mantra dan Tujuan. YouTube.  
<https://www.youtube.com/watch?v=gBApyNWLP7g&t=732s>

- Eko. 2021, 12 November. Ganti *SDGs* Desa Dengan *SDTs* Desa. YouTube.  
<https://www.youtube.com/watch?v=Ugwt4oTSbI0>
- Eko. 2021, 9 November. Pembangunan: Kapitalisasi, Isolasi, Eksklusi. YouTube.  
<https://www.youtube.com/watch?v=qRYxKERU2Js&t=22s>
- Eko. 2021, 19 Juli. Menantang Project Making. YouTube.  
<https://www.youtube.com/watch?v=QZ2IndSb93s&t=11s>
- Eko. 2021, 25 Mei. Sok Tahu Desa!. YouTube.  
[https://www.youtube.com/watch?v=-hipMf1\\_SVc&t=28s](https://www.youtube.com/watch?v=-hipMf1_SVc&t=28s)
- Eko. 2021, 26 Maret. Sepuluh Salah Kaprah Pembangunan Desa. YouTube.  
<https://www.youtube.com/watch?v=RslD6469piA&t=4739s>
- Eko. 2021, 19 Maret. Pemerintahan dan Pembangunan #1: NEGARA DEVELOPMENTAL. YouTube.  
<https://www.youtube.com/watch?v=CR1fswVpjJU>
- Eko. 2021, 15 Februari. MODERNISASI DESA???. YouTube.  
<https://www.youtube.com/watch?v=Lx66Ho5cVF4&t=749s>
- Eko. 2022, 7 Mei. Kuliah *Governmentality*. Youtube.  
<https://www.youtube.com/watch?v=UpvK3e9GMIs&list=LL&index=9>
- Bilik Insider.2019, 14 Oktober. MICHEL FOUCAULT! KEKUASAAN DAN PENGETAHUAN!. Yotube.  
<https://www.youtube.com/watch?v=IVCsgjg7ci8&list=LL&index=3&t=429s>
- Eko, S. (2021). 10 Salah Kaprah Pelaksanaan UU Desa.  
<https://www.desapedia.id/2021/03/10salahkaprahpelaksanaanuudesa.html>
- <https://jdih.bpk.go.id/wp-content/uploads/2021/06/BLT-Dana-Desa-Berdampak-Besar-pada-Pemulihan-Ekonomi-Desa.pdf>
- <https://news.detik.com/berita/d-6054308/mendes-pdtt-minta-kebijakan-pembangunan-desa-mengacu-pada-SDGs-desa>
- <https://news.detik.com/berita/d-5217876/penyaluran-program-kementerian-dinilai-belum-tepat-sasaran-di-des>
- <https://desasambirejo.smartvillagenusantara.id/2021/05/04/sosialisasi-dan-bentuk-relawan-pokja-pendataan-SDGs-sambirejo/>

<https://islambergerak.com/2018/11/developmentalisme-otoritarianisme-dan-nasionalisme-menggagas-studi-pembangunan-radikal-di-indonesia-bagian-1/>

<https://www.kompasiana.com/manhaj/55011adf8133116819fa82cf/gagalnya-penerapan-developmentalism-pada-masa-orde-baru>

[https://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/11731/3/T1\\_362012079\\_BAB%20III.pdf](https://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/11731/3/T1_362012079_BAB%20III.pdf)

<https://www.beritasatu.com/nasional/529414/aktivis-1998-repelita-orde-baru-gagal>

<https://www.sosiologi.info/2020/07/pemikiran-michel-foucault-teori-relasi-kuasa.html>

<http://fuad-setiawan.blogspot.com/2011/06/berkenalan-dengan-ideologi.html>

<http://rachmatdwimulya.blogspot.com/2014/09/konsep-developmentalisme.html>